

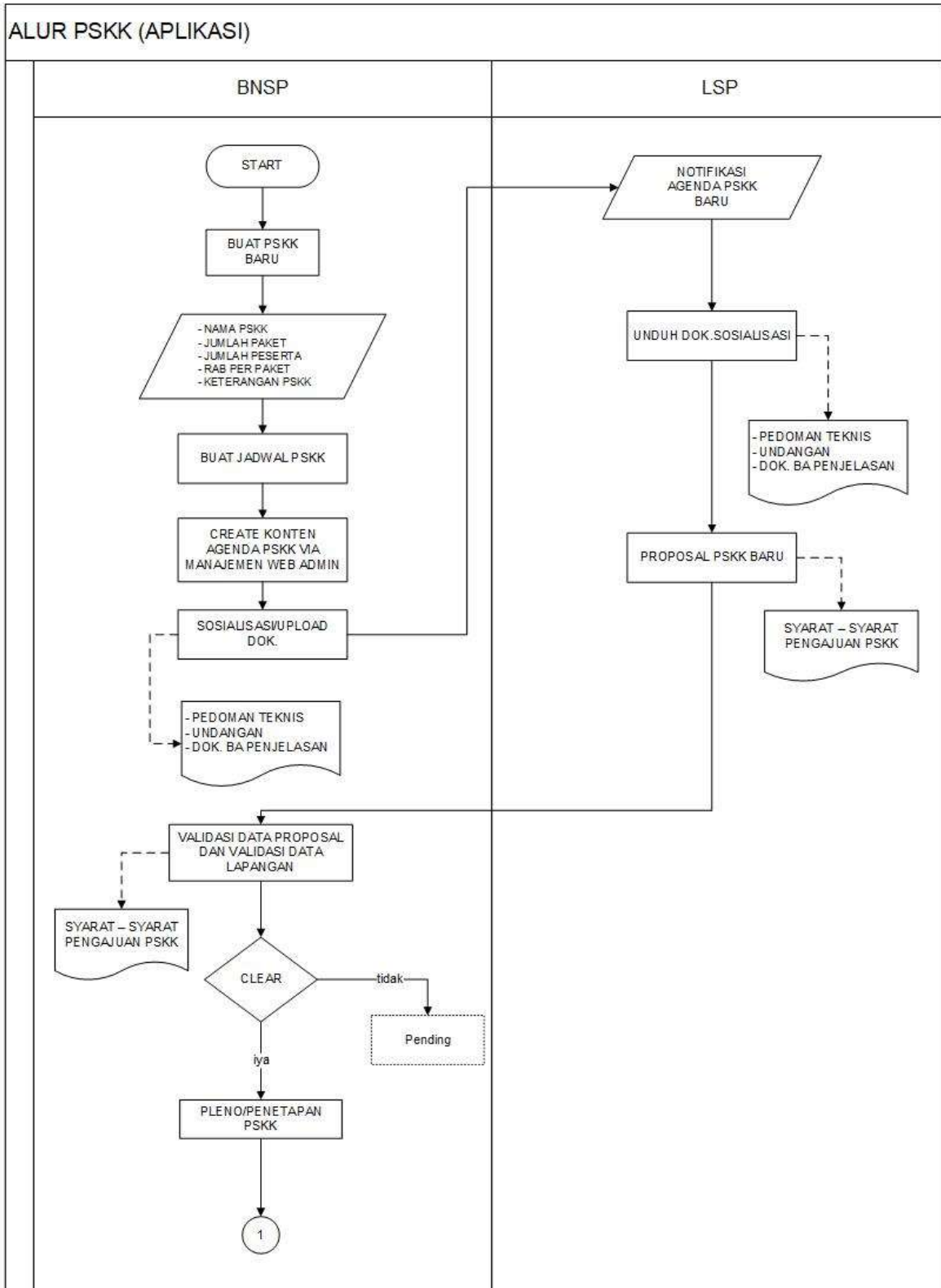


Buku Panduan Sistem PSKK
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

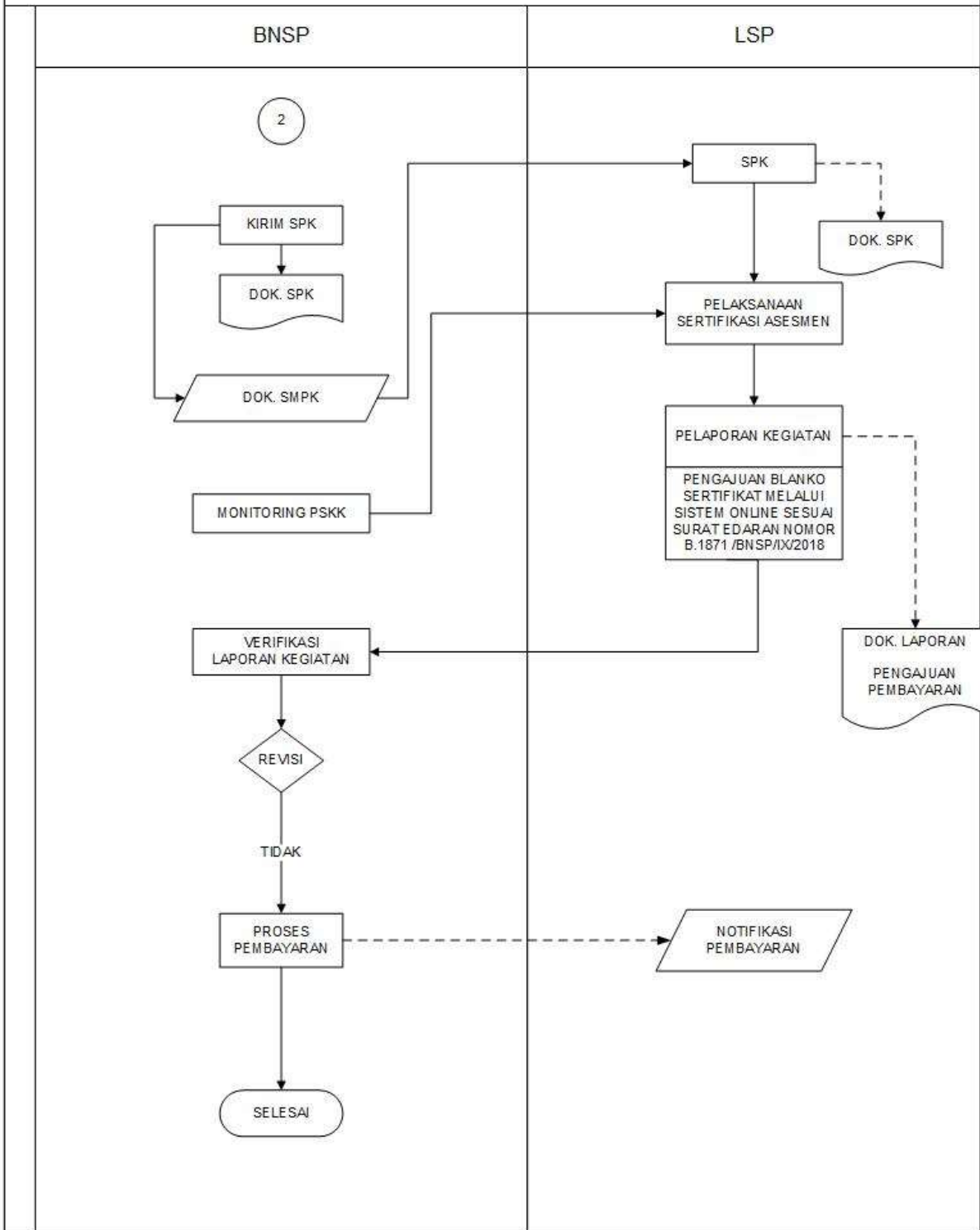
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
A. ALUR APLIKASI PSKK.....	3
B. Login Sistem PSKK.....	5
C. Update Menu Kelengkapan PSKK	6
1. Menu Profil LSP	6
2. Update Data Skema	9
3. Update Data Tuk.....	14
4. Data Skema TUK.....	15
5. Data Profil Asesor	18
6. Data Lisensi/ Sertifikat Asesor	19
7. Data Kompetensi Asesor	21
8. Data SDM LSP	24
9. Data Struktur Organisasi LSP	26
10. Data Mitra/ Binaan LSP.....	28
11. Media Sosial LSP	31
12. Pembuatan Jadwal PSKK.....	32
E. CEK KELENGKAPAN DATA LSP	35
F. INPUT PROPOSAL PSKK.....	35
G. CETAK PROPOSAL.....	43
H. CONTOH HASIL PROPOSAL.....	46

A. ALUR APLIKASI PSKK



ALUR Kegiatan PSKK (LANJUTAN)

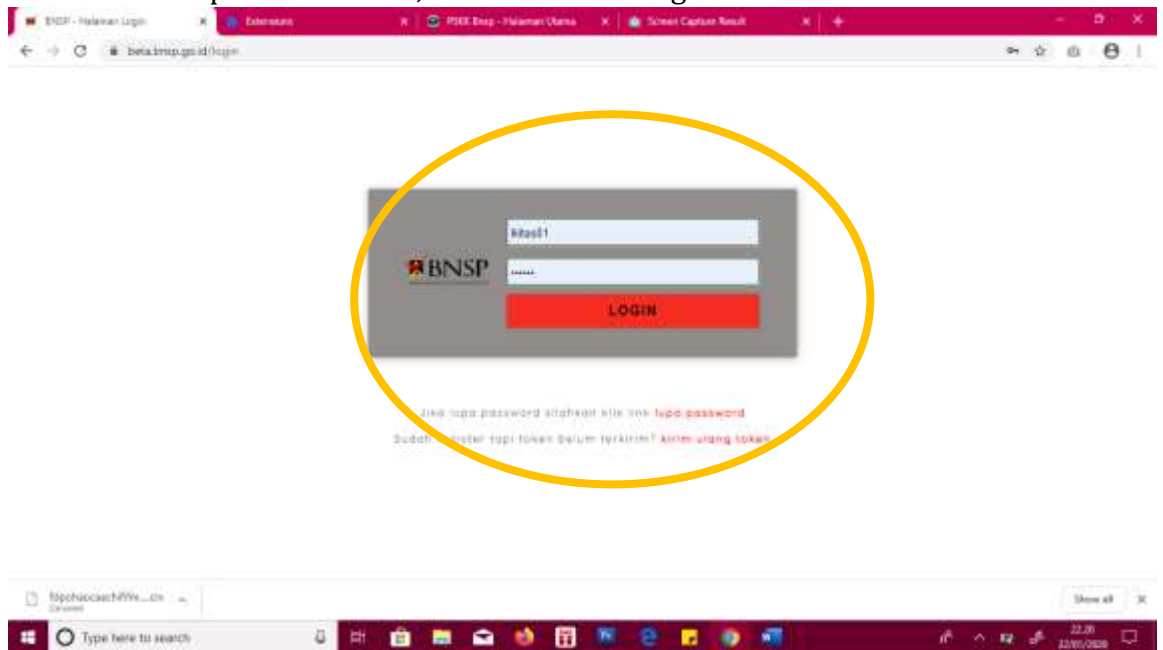


B. Login Sistem PSKK

1. Buka browser anda, pada address bar ketikkan laman **bnspp.go.id**
2. Klik menu login



3. Anda akan diarahkan ke halaman user login system BNSP, masukkan username dan password anda, lalu klik button login



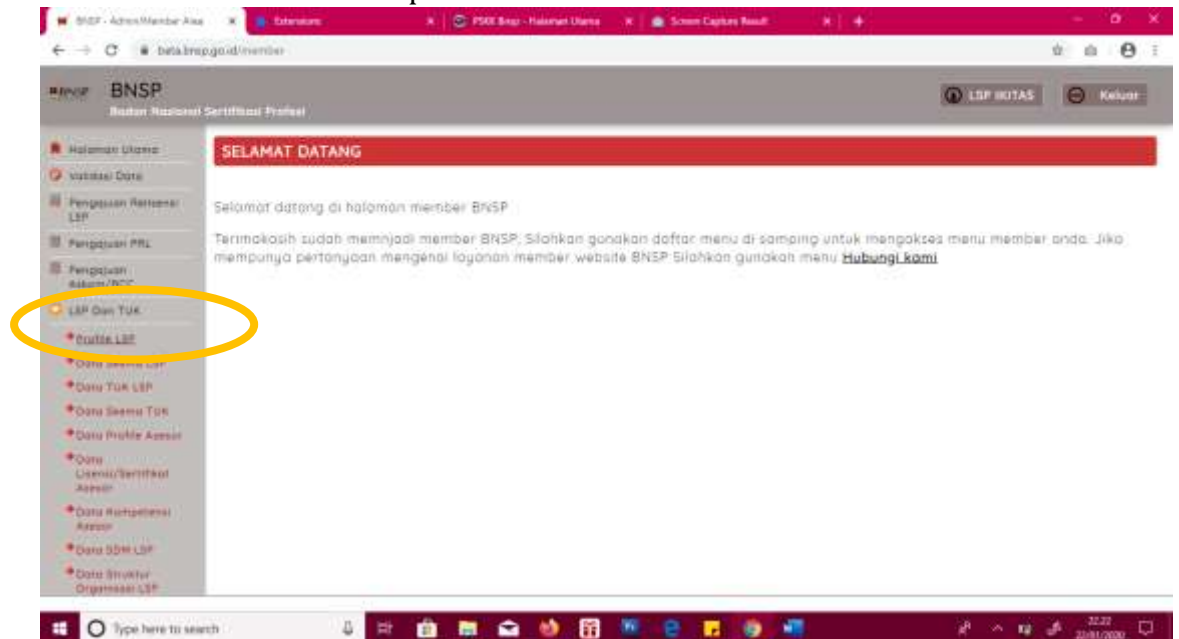
4. Jika berhasil anda akan masuk ke system BNSP
5. Sebelum anda registrasi PSKK, pastikan anda sudah melengkapi data pada bagian
 - a. Profil LSP
 - b. TUK
 - c. Asesor dan kompetensi asesor
 - d. Skema Kompetensi

C. Update Menu Kelengkapan PSKK

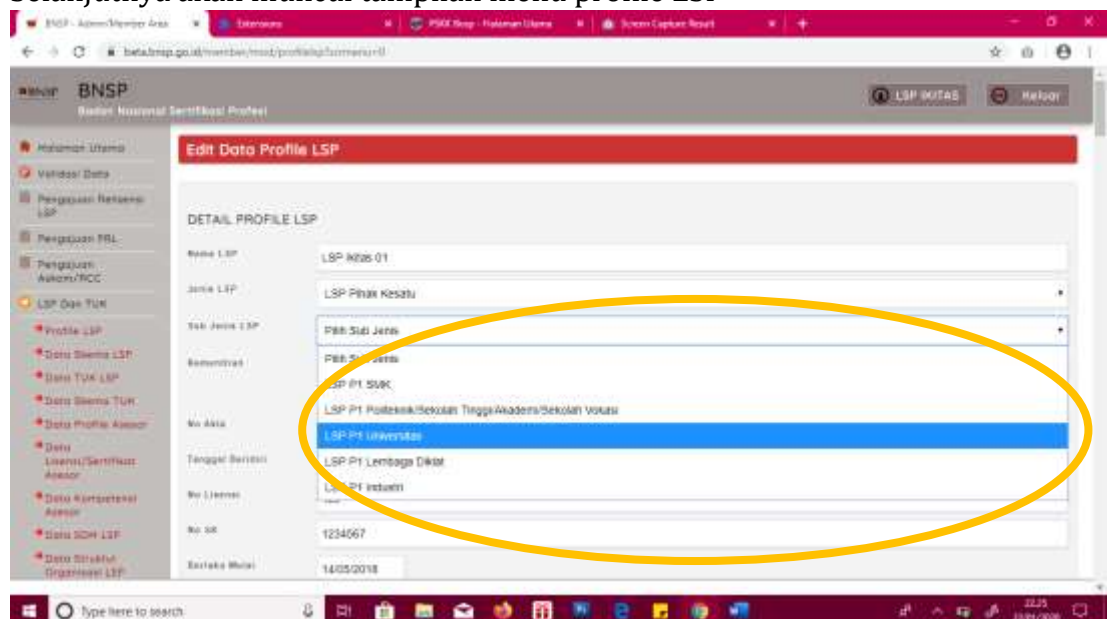
1. Menu Profil LSP

Pastikan anda sudah masuk ke dashboard system BNSP

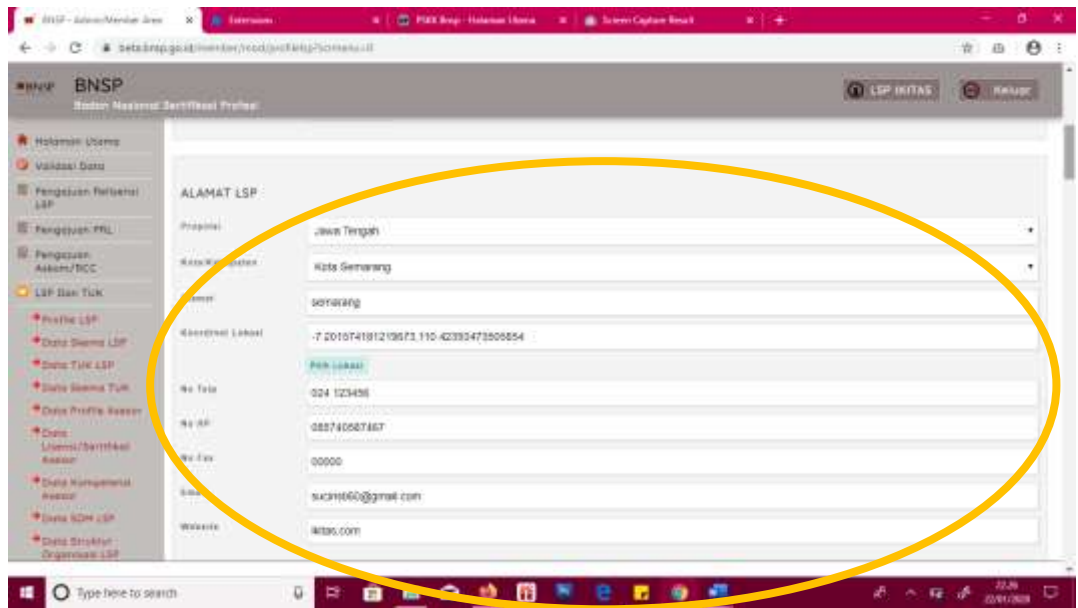
Klik menu LSP dan TUK → pilih submenu Profile LSP



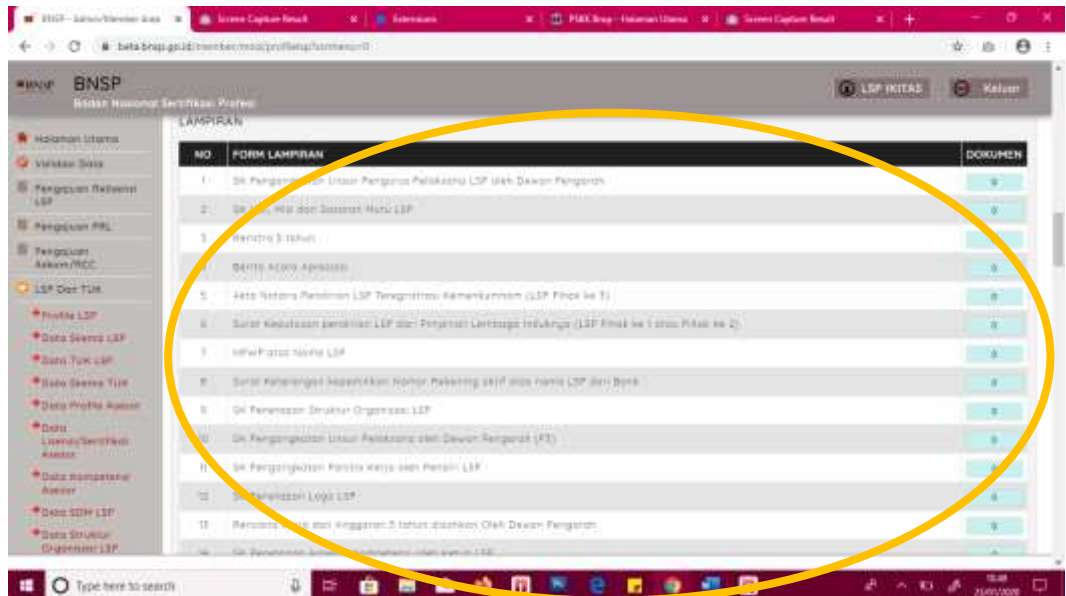
a. Selanjutnya akan muncul tampilan menu profile LSP



- Update bagian Sub Jenis LSP
- Jika menginduk ke Kementerian, update juga bagian Kementerian

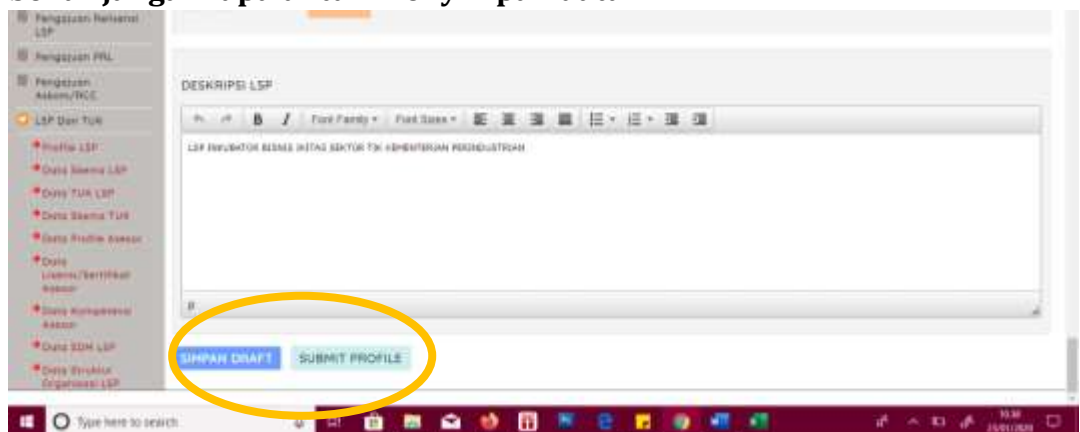


- Update Alamat LSP
- Update juga pada data lainnya
- **NPWP dan rekening**



- Pada bagian lampiran bersifat OPTIONAL (Boleh diisi boleh tidak mengikuti kebijakan BNSP) tapi jika ada sudah ada datanya, akan lebih baik jika diisi..... **pada website adalah 9 yang wajib berwarna merah**

b. Isikan deskripsi profil LSP, Jika semua data sudah yakin diisi dan benar jangan lupa untuk menyimpan data



- a. Simpan draft, berfungsi untuk menyimpan profil dalam bentuk draft dan data masih bias diedit
- b. Submit profile, berfungsi untuk menyimpan dan submit data profile, jika anda sudah mensubmit profil data tdak bisa diedit lagi, anda harus **request edit profile ke BNSP untuk meminta akses revisi profile**

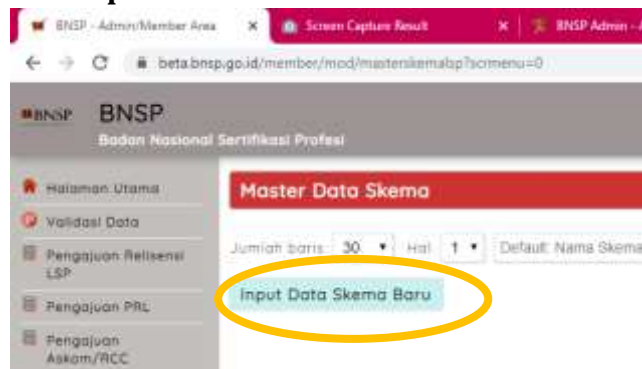
• UNTUK PENDAFTARAN PSKK, DATA PROFIL WAJIB DI SUBMIT TIDAK HANYA DALAM POSISI SAVE DRAFT, PASTIKAN PROFIL JUGA SUDAH TERVALIDASI BNSP BARU BISA PENGAJUAN PSKK

2. Update Data Skema

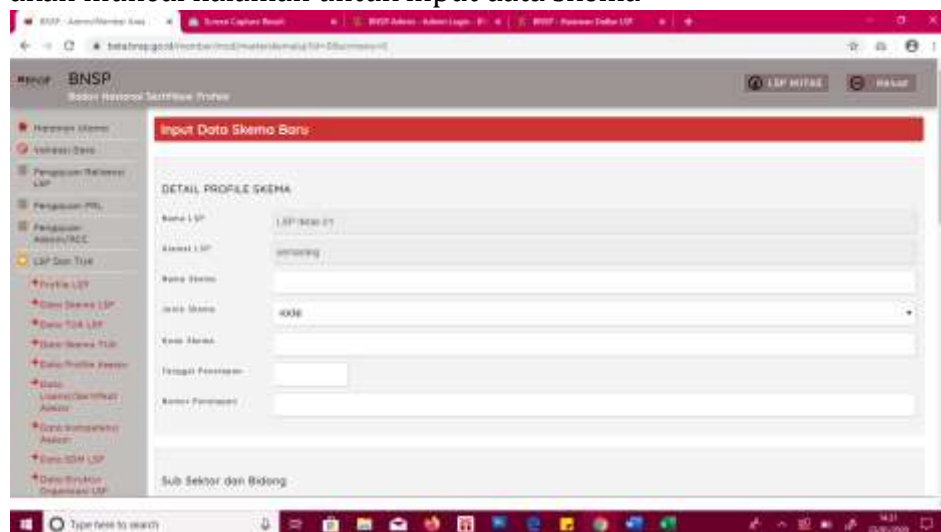
Jika LSP sudah mempunyai data skema, bisa langsung mengupdate data skema, untuk yang skema belum mulai menginput pada input data skema baru



a. Klik input skema baru

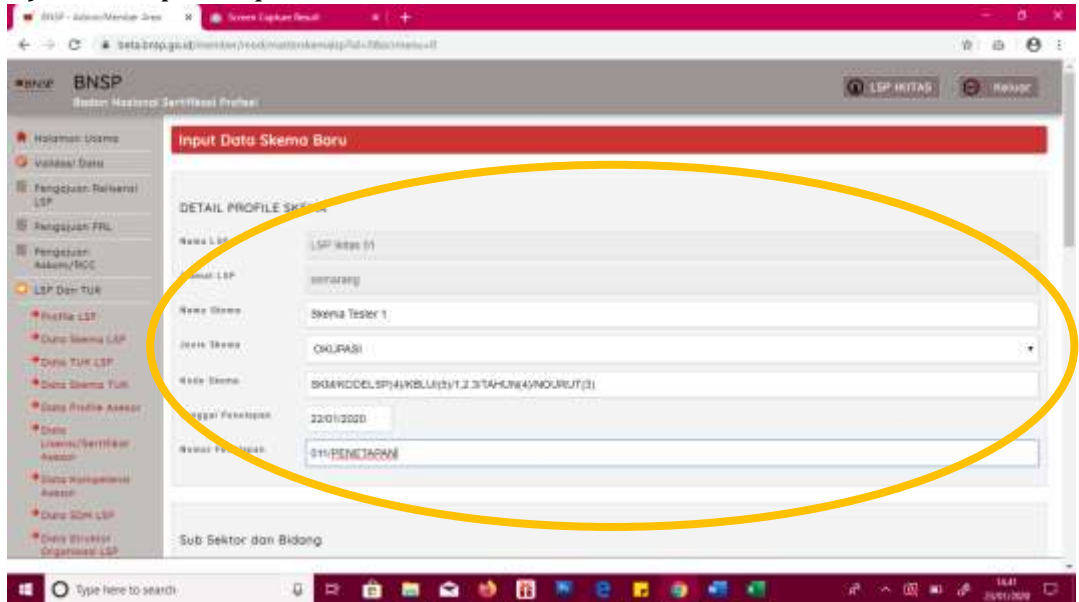


b. akan muncul halaman untuk input data skema

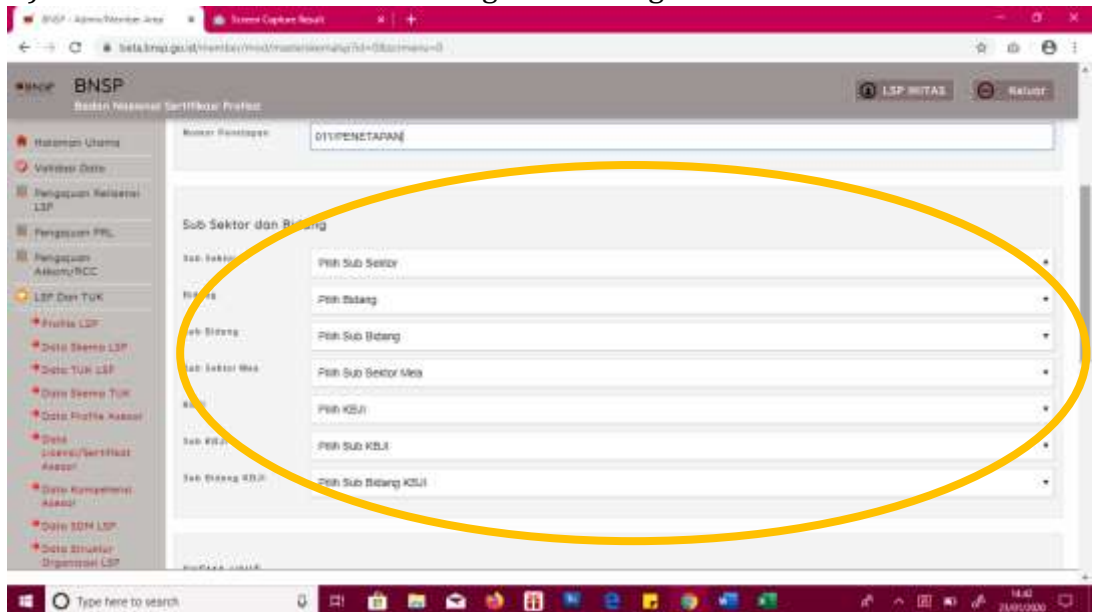


c. Inputkan data skema

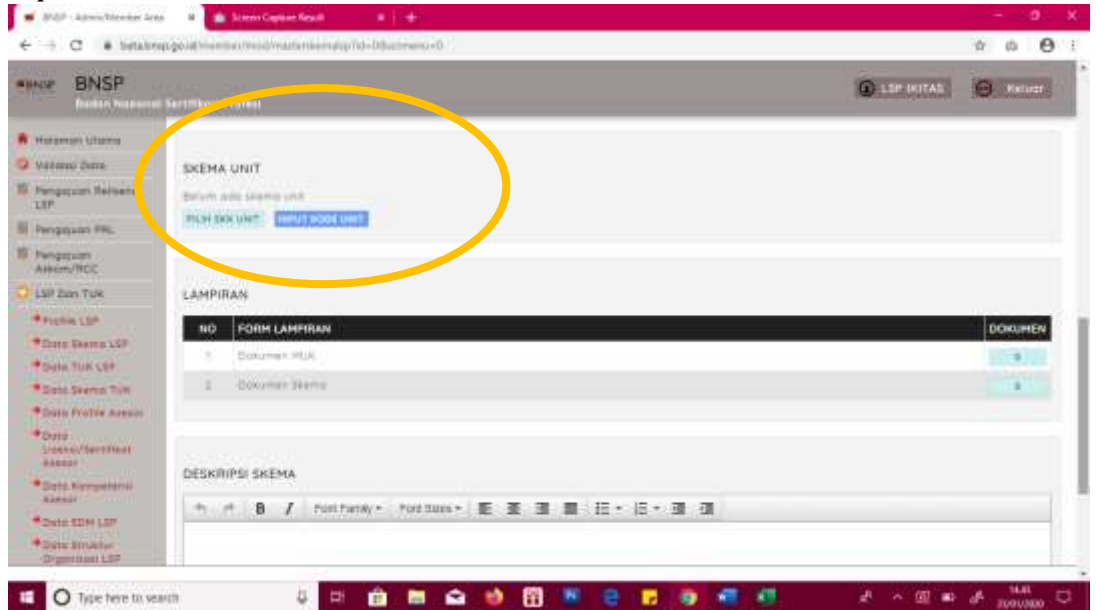
- 1) nama skema : diinput dengan nama skema LSP
- 2) Jenis skema : KKN/ OKUPASI/ KLASER
- 3) Kode skema : otomatis di sistem
- 4) Tanggal penetapan
- 5) Nomor penetapan



6) Masukkan subsector dan bidang sesuai dengan skema



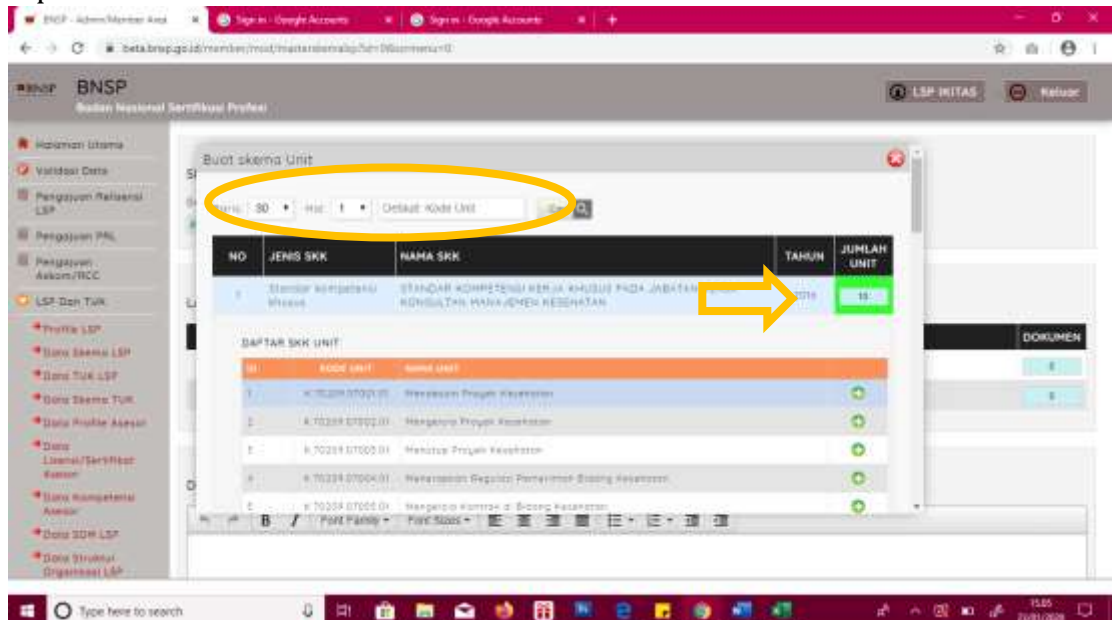
7) Inputkan skema unit



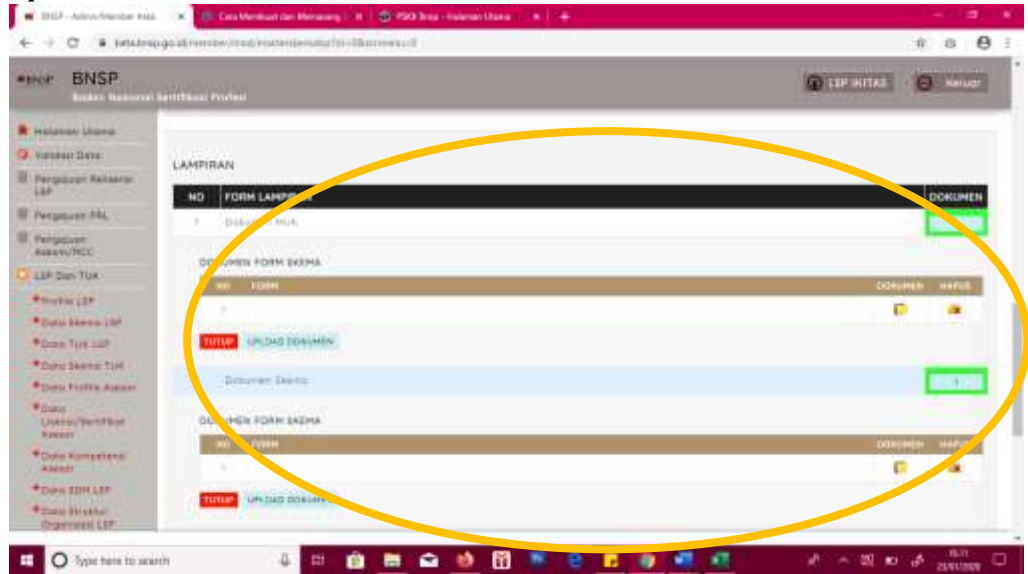
- Pilih SKK unit untuk menginputkan data unit kompetensi berdasarkan kode unit kompetensi
- Klik input kode unit untuk menginputkan kode unit langsung menggunakan kode unit kompetensi

*pastikan kode unit sudah terdaftar pada website BNSP

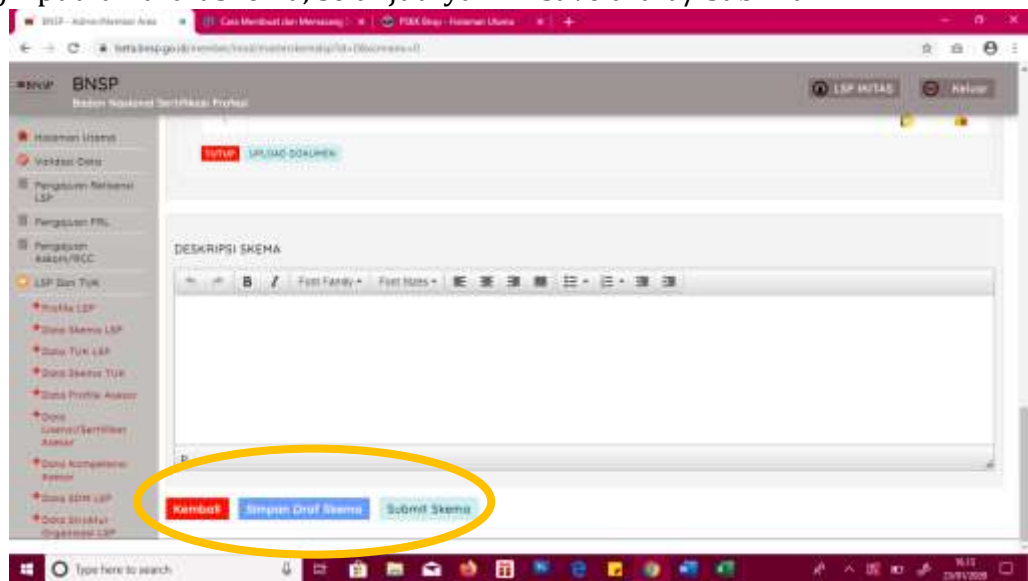
8) Inputkan kode unit



- 12) Upload skema dengan format dokumen PDF dan maksimal adalah 2 MB
Untuk dokumen yang kurang bisa dibuat per part dengan maksimal upload adalah 2 MB



- 13) Inputkan draft skema, selanjutnya klik save draft / submit



***DATA SKEMA YANG BISA DIAJUKAN PSKK ADALAH DATA SKEMA YANG SUDAH DIVALIDASI OLEH BNSP, JADI PASTIKAN SKEMA DALAM POSISI SUBMIT AGAR BISA DIVALIDASI BNSP**

3. Update Data Tuk

The screenshot shows the 'Input Data TUK Baru' form in the BNSP system. The form is divided into several sections:

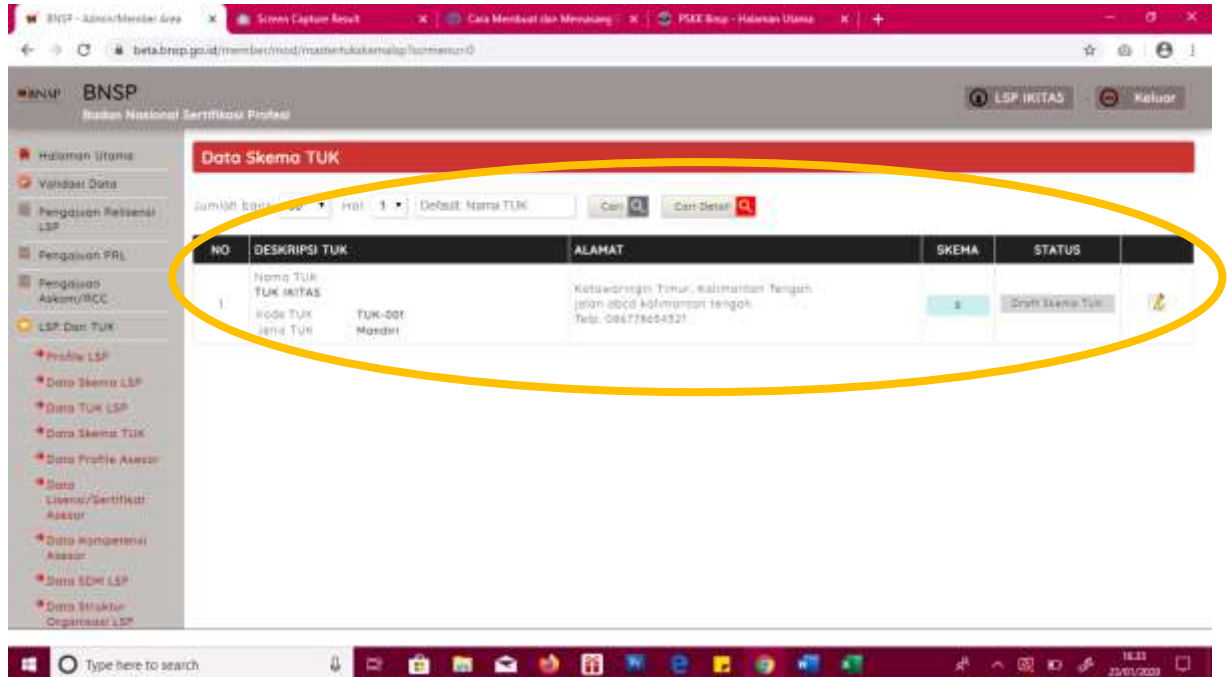
- DETAIL PROFILE TUK:** Fields for Name LSP TUK (LSP MBAS IT), Alias LSP TUK (semarang), Name TUK (TUK KOTAS), Area TUK (Mandi), and Code TUK (TUK-001).
- ALAMAT TUK:** Fields for Province (Kalmantan Tengah), District (Kotawaring Timur), Address (jalan abc kalmantan tengah), Phone Number (6 200095838097312 106.85821458124894), and a link to the PIA LSP.
- DATA LAINNYA:** A field for Logo with a placeholder image.
- USER LOGIN TUK:** Fields for Username (TUK001), Email (tuk@mbas.com), Password (masked), and Repeat Password (masked). This section is highlighted with a yellow oval.
- DESKRIPSI TUK:** A text area for the TUK description, currently containing 'tuk mandi itas'.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Kembali' (Return), 'Simpan Draft TUK' (Save Draft TUK), and 'Submit TUK'.

Update data User Login TUK, jangan lupa klik Simpan draft dan jika sudah yakin klik Submit TUK

***TUK YANG BISA MASUK KE PSKK ADALAH TUK YANG SUDAH DISUBMIT, PASTIKAN TUK ANDA DALAM POSISI SUMBIT**

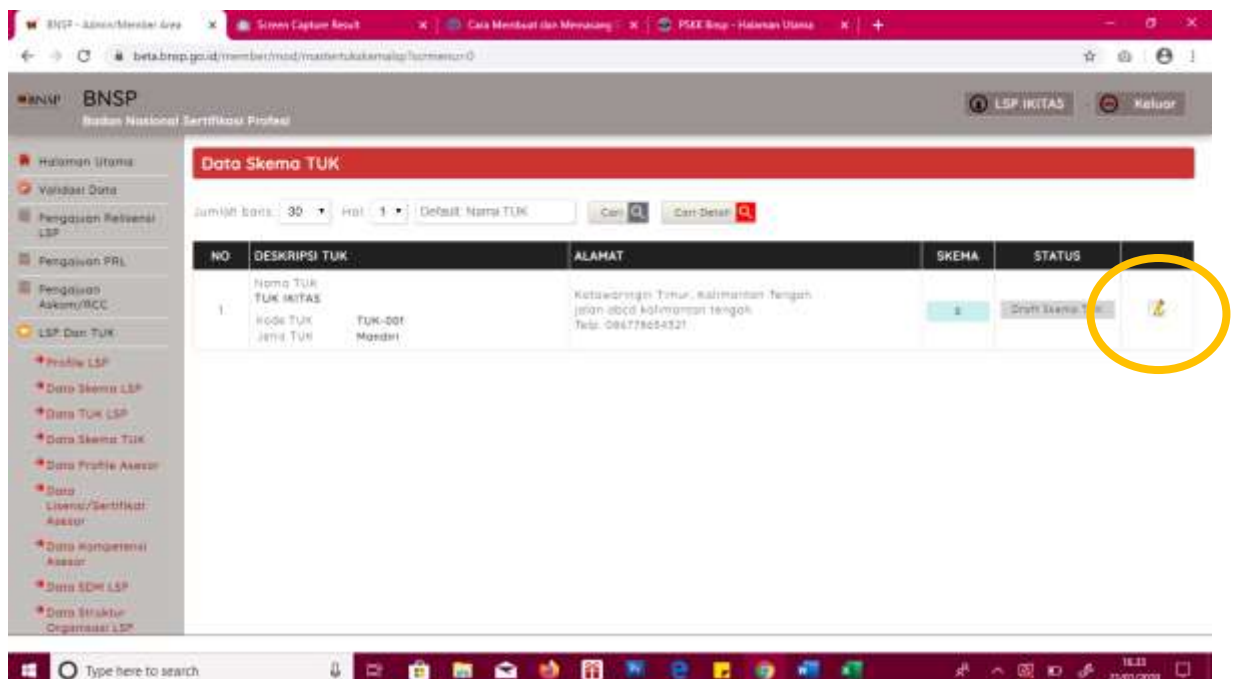
4. Data Skema TUK

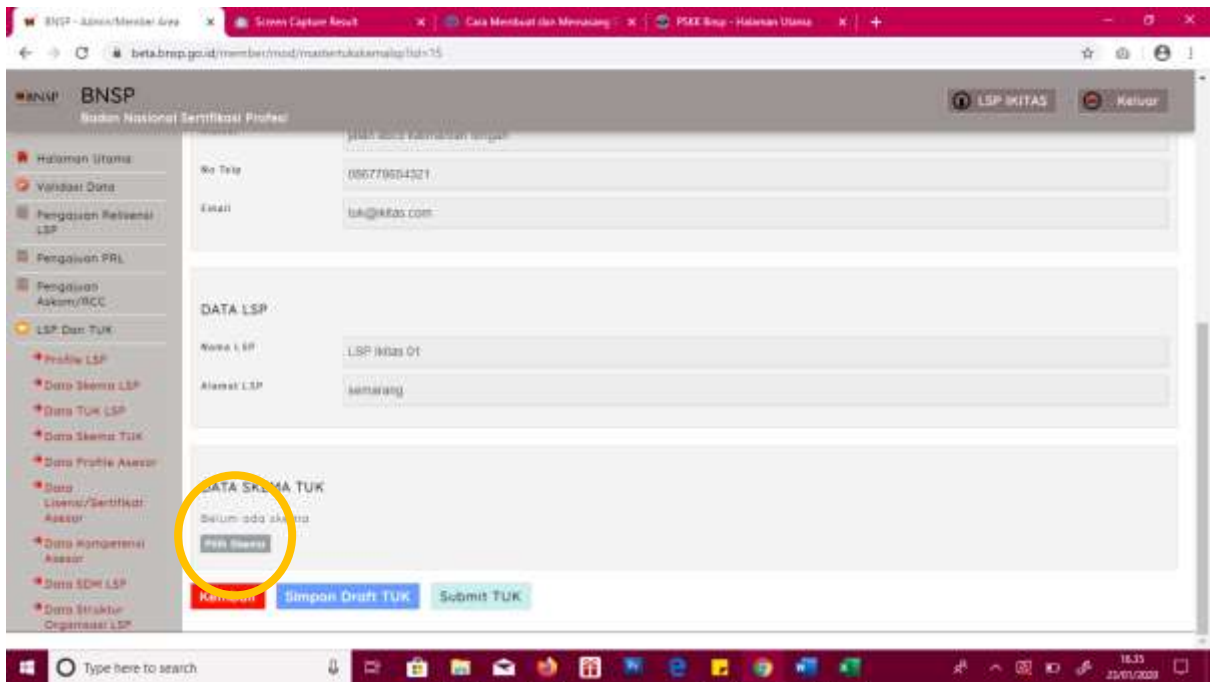


Update data TUK yang akan digunakan untuk PSKK

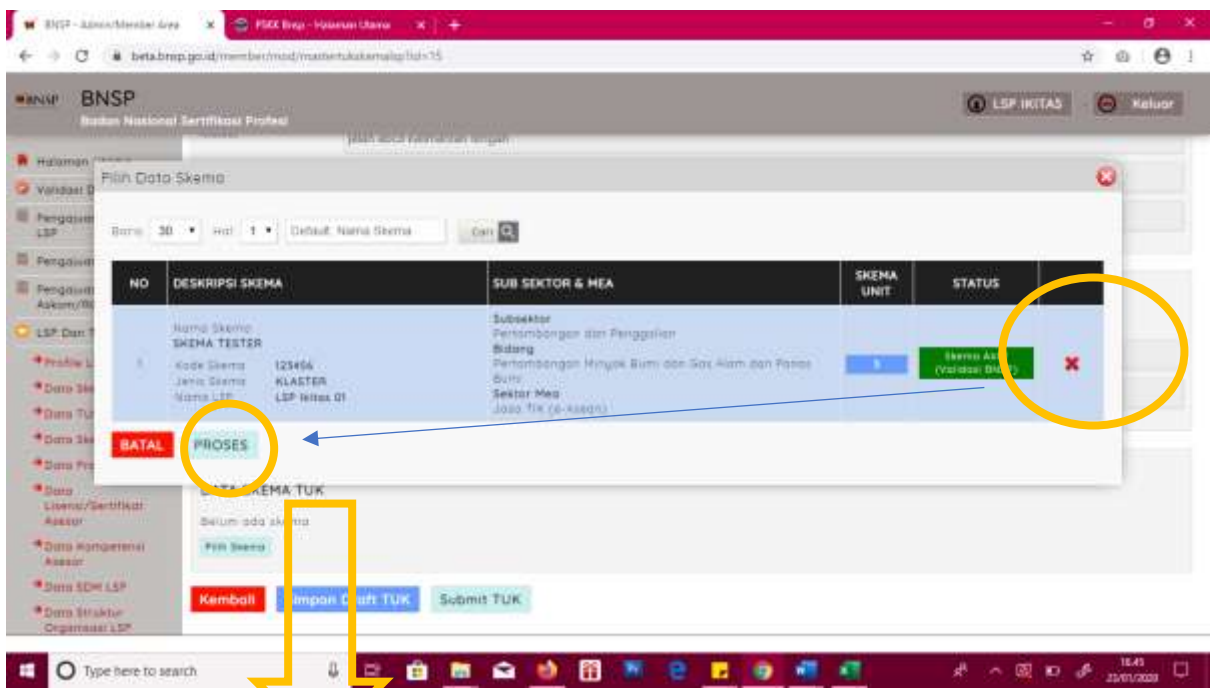
Update dapat dilakukan apabila data skema sudah aktif dan sudah divalidasi BNSP

Klik gambar pensil

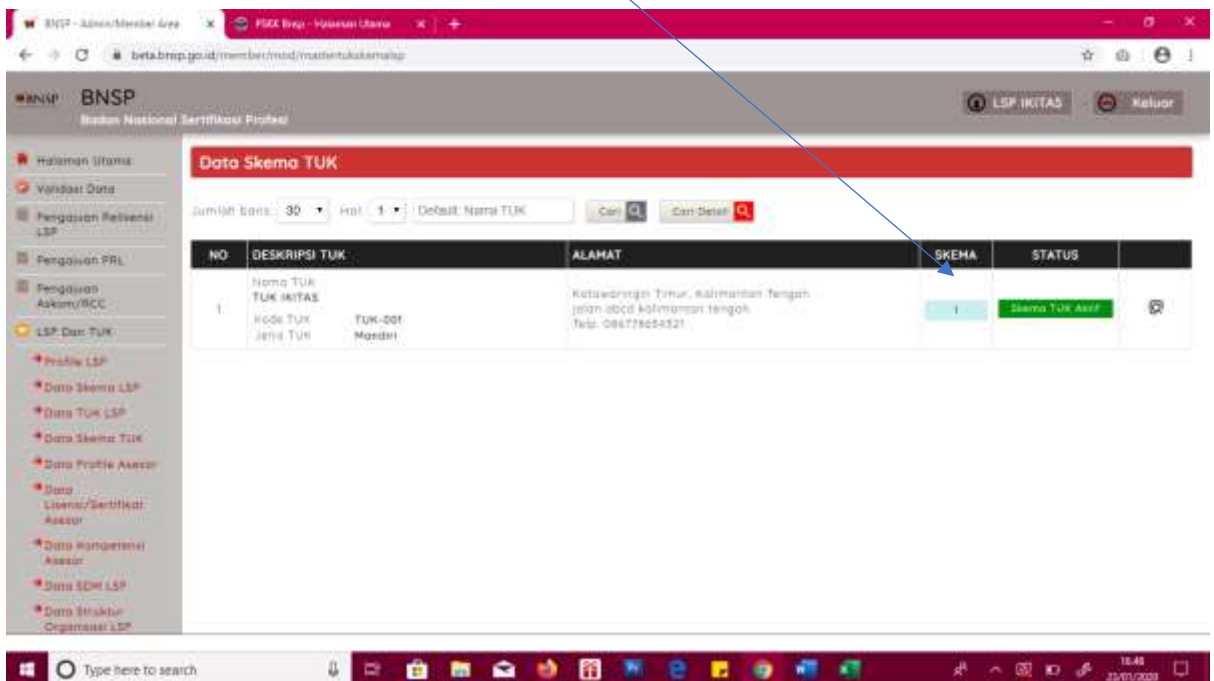
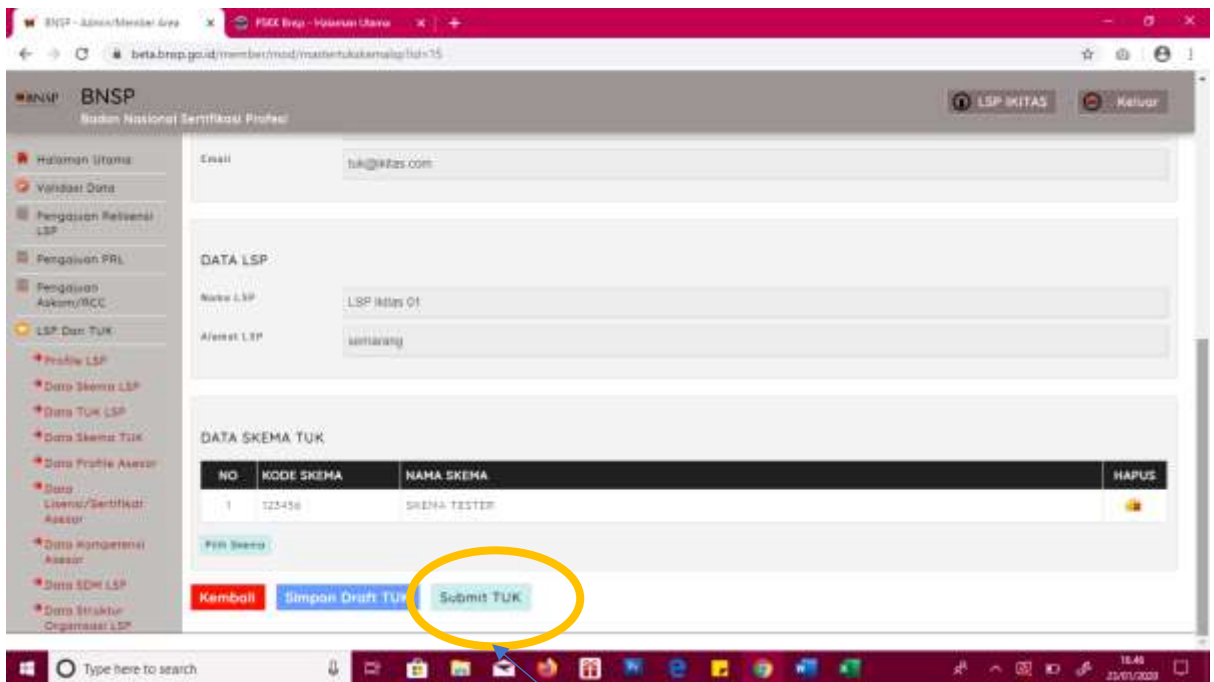




Pilih data skema, klik tanda silang lalu klik proses



Jangan lupa untuk mensubmit data **HANYA JIKA DATA SUDAH BENAR** jika anda belum yakin klik save draft



SKEMA TUK YANG BISA MASUK KE PSKK ADALAH SKEMA TUK YANG SUDAH DISUBMIT, PASTIKAN SKEMA TUK ANDA DALAM POSISI SUMBIT (VALIDASI LSP)

5. Data Profil Asesor

- Home LSP
- Data Skema LSP
- Data TUK LSP
- Data Skema TUK
- Data Profil Asesor
- Data Lisensi/Sertifikat Asesor
- Data Kompetensi Asesor
- Data SDm LSP
- Data Struktur Organisasi LSP
- Data Mitra/Binaas LSP
- Pendaftaran Sertifikat Lisensi

DATA PROFILE ASESOR

Nama Registrasi Asesor	MET.000.000.000
Nama Asesor	RANA SUCI RISTIYANTI
NIK	3325046987554321
Tempat Lahir	BATANG
Tanggal Lahir	23/09/1995
Jenis Kelamin	Pelampuan

ALAMAT KTP

Provinsi KTP	Jawa Tengah
Kota/Kabupaten KTP	Batang
Alamat KTP	JALAN ABCD SEMARANG

ALAMAT TEMPAT TINGGAL

Status Tempat Tinggal	Sama Dengan KTP
Provinsi Tempat Tinggal	Jawa Tengah
Kota/Kabupaten Tempat Tinggal	Batang
Alamat Tempat Tinggal	JALAN ABCD SEMARANG

DATA LAINNYA

No HP	085327663876
Negara	INDONESIA
Pendidikan	S1
Pekerjaan	Konstruksi

DATA USER LOGIN

Email (Username)	mail@mail.com
Password
Ulang Password

[Kembali](#) [Simpan Draft Profile Asesor](#) [Submit Profile Asesor](#)

Update pada bagian


Alamat tempat tinggal, Data lainnya dan pastikan Data User Login, untuk email pastikan email valid karena akan digunakan untuk login asesor

Klik save draft apabila ingin menyimpan draft, klik Submit jika ingin submit data (validasi LSP)

DATA ASESOR YANG BISA MASUK KE PSKK ADALAH ASESOR YANG SUDAH DISUBMIT, PASTIKAN DATA ASESOR ANDA DALAM POSISI SUMBIT

6. Data Lisensi/ Sertifikat Asesor

The screenshot shows the BNSP website interface. On the left sidebar, the menu item 'Data Lisensi/Sertifikat Asesor' is highlighted with a yellow circle. The main content area displays a table titled 'Data Lisensi Asesor' with the following data:

NO	PROFILE ASESOR	USERNAME/EMAIL	JML. LISENSI	STATUS	EDIT
1	Nama Asesor: RAINA SUCI RISTYANTI No Registrasi: MET.000.000.000 Jenis Kelamin: Perempuan Nama LSP: LSP Nitras 01	ma@gmail.com	1	Daftar Lisensi Asesor	

Update lisensi sertifikat asesor, klik button edit....

The screenshot shows the BNSP website interface for updating the license. The left sidebar has 'Data Lisensi/Sertifikat Asesor' highlighted. The main content area displays a form with the following details:

ASASOR: MET.000.000.000
Nama Asesor: RAINA SUCI RISTYANTI
NIK: 3225040387654321
Tempat Lahir: BATANG
Tanggal Lahir: 23/09/1996
Jenis Kelamin: Perempuan
Nama LSP Asesor: LSP Nitras 01

DATA LISENSI

[Input Data Lisensi](#)

[Kembali](#) [Simpan Draft Lisensi Asesor](#) [Submit Data Lisensi Asesor](#)

Klik input Data Lisensi

Inputkan data lisensi asesor, selanjutnya klik simpan

The screenshot shows the 'Input Lisensi Asesor' form in the BNSP system. The form is highlighted with a yellow border and contains the following fields:

- Jenis Lisensi: Lead Asesor Kompetensi
- Nomor Lisensi: MET00000000
- Nomor Blanko: 456789
- Tanggal Sertifikat: 30/01/2020
- Tanggal Expired Sertifikat: 30/01/2025

Buttons for BATAL and SIMPAN are visible at the bottom of the form.

Jika sudah clear, jangan lupa submit untuk Data Lisensi Asesor

The screenshot shows the 'DATA LISENSI' table in the BNSP system. The table has the following columns: NO, JENIS, NOMOR, NOMOR BLANKO, TGL. SERTIFIKAT, TGL. EXP. SERTIFIKAT, and HAPUS. The data row shows:

NO	JENIS	NOMOR	NOMOR BLANKO	TGL. SERTIFIKAT	TGL. EXP. SERTIFIKAT	HAPUS
1	LEAD ASESOR Kompetensi	MET00000000	456789	30/01/2020	30/01/2025	

DATA LISENSI ASESOR YANG BISA MASUK KE PSKK ADALAH DATA LISENSI ASESOR YANG SUDAH DISUBMIT, PASTIKAN DATA LISENSI ASESOR ANDA DALAM POSISI SUMBIT

7. Data Kompetensi Asesor

Master Data Kompetensi Asesor

Jumlah baris: 30 | Hal: 1 | Default: Nama Asesor

NO	PROFILE ASESOR	USERNAME/EMAIL	JHL SKEMA	STATUS	EDIT
1	Nama Asesor: RAINA SUCI RISTIYANTI No Registrasi: MET.000.000.000 Jenis Kelamin: Perempuan Nama LSP: LSP Ikhtas 01	ma@mail.com		Draft Skema Asesor	

a. Klik button edit

Master Data Kompetensi Asesor

Jumlah baris: 30 | Hal: 1 | Default: Nama Asesor

NO	PROFILE ASESOR	USERNAME/EMAIL	JHL SKEMA	STATUS	EDIT
1	Nama Asesor: RAINA SUCI RISTIYANTI No Registrasi: MET.000.000.000 Jenis Kelamin: Perempuan Nama LSP: LSP Ikhtas 01	ma@mail.com		Draft Skema Asesor	

b. Inputkan dua data:

1) Data Skema Kompetensi yang dimiliki asesor

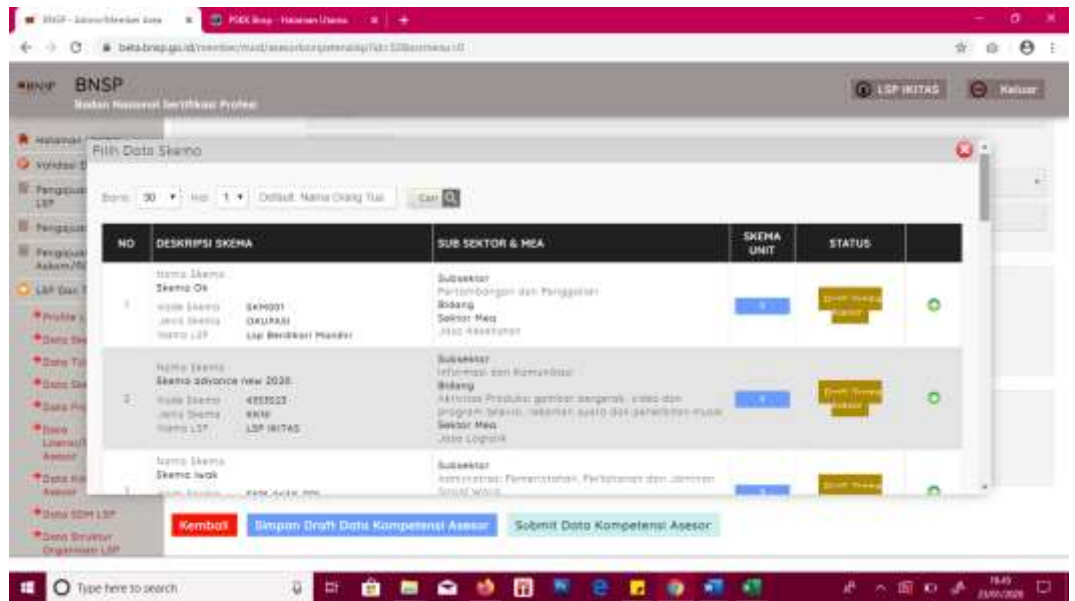
DATA SKEMA KOMPETENSI

Input Data Skema Kompetensi

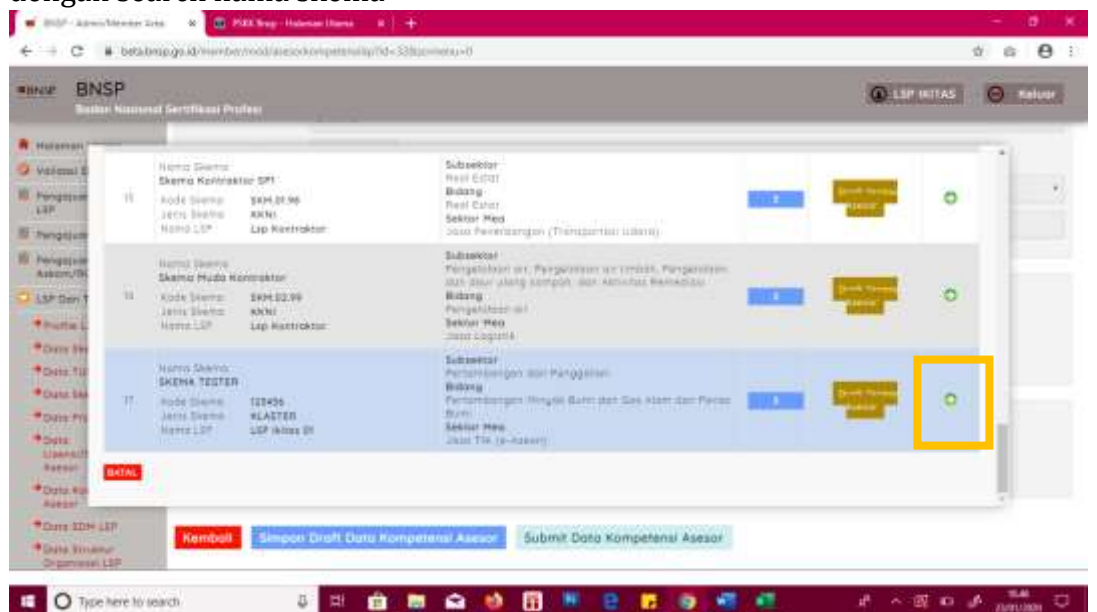
STATUS

Kembali | Simpan Draft Data Kompetensi Asesor | Submit Data Kompetensi Asesor

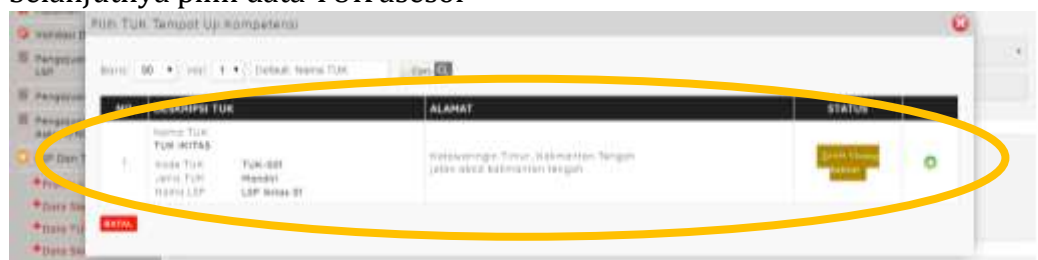
a) Input data skema, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut:



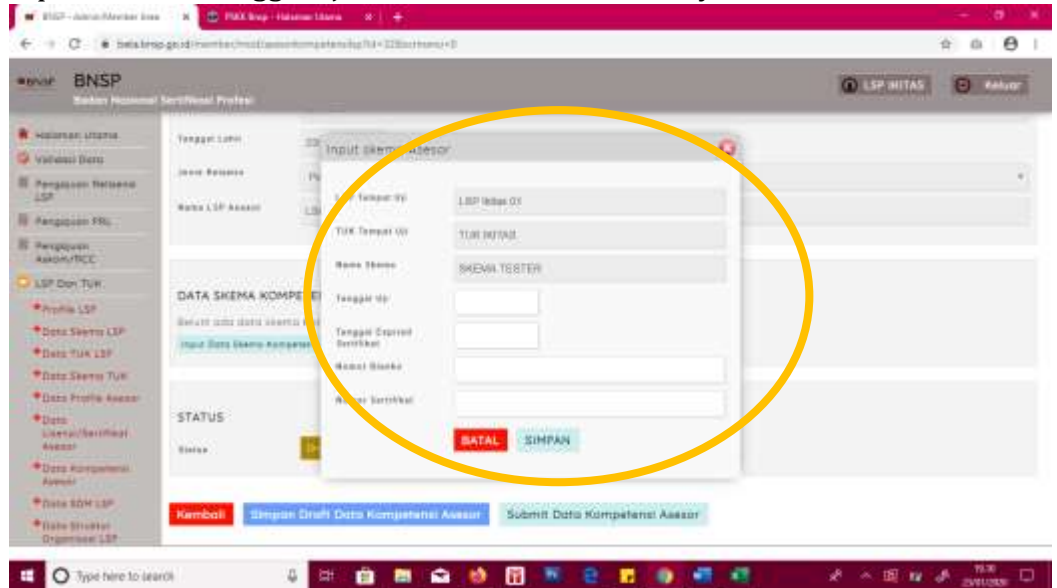
b) Pilih skema sesuai kompetensi asesor, untuk memudahkan bisa juga dengan search nama skema



c) Selanjutnya pilih data TUK asesor

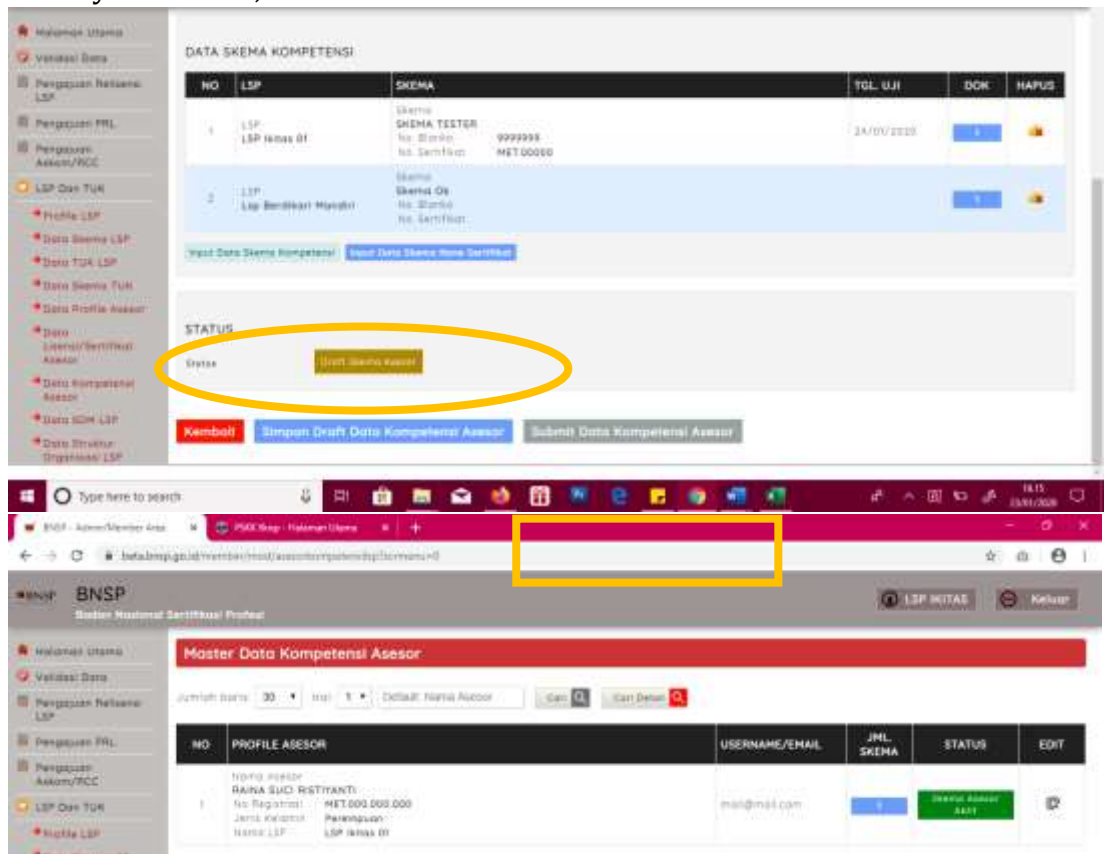


d) Inputkan data tanggal uji asesor beserta data lainnya



e) Jika data sudah selesai klik simpan

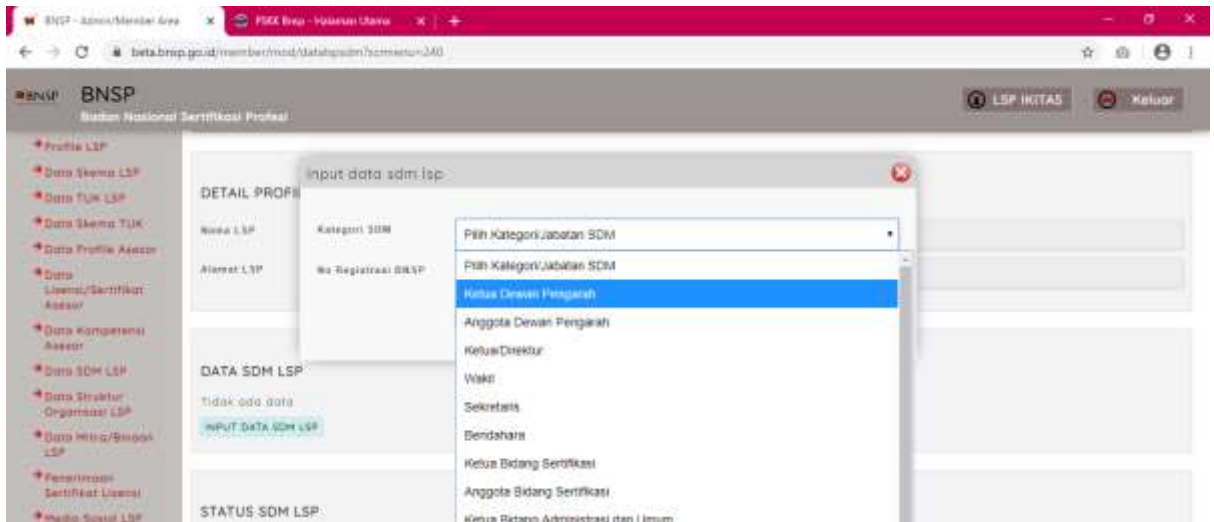
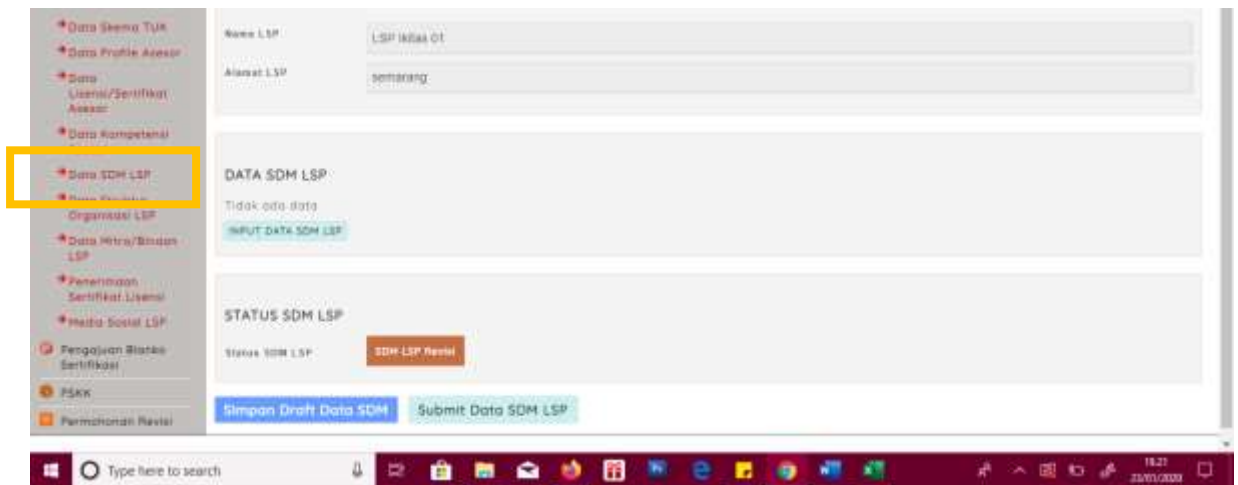
2) Inputkan juga data data skema none sertifikat, jika data sudah tersimpan dan diyakin benar, klik submit



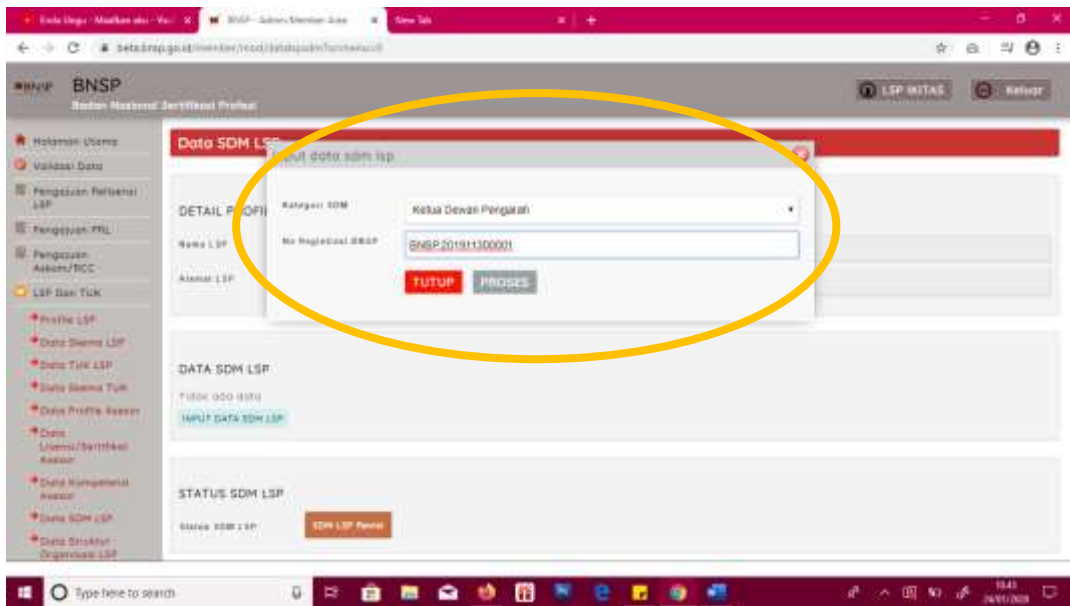
- **UNTUK DATA KOMPETENSI ASESOR PASTIKAN DALAM POSISI SUBMIT UNTUK DIAJUKAN KE PSKK**

8. Data SDM LSP

Inputkan data SDM LSP

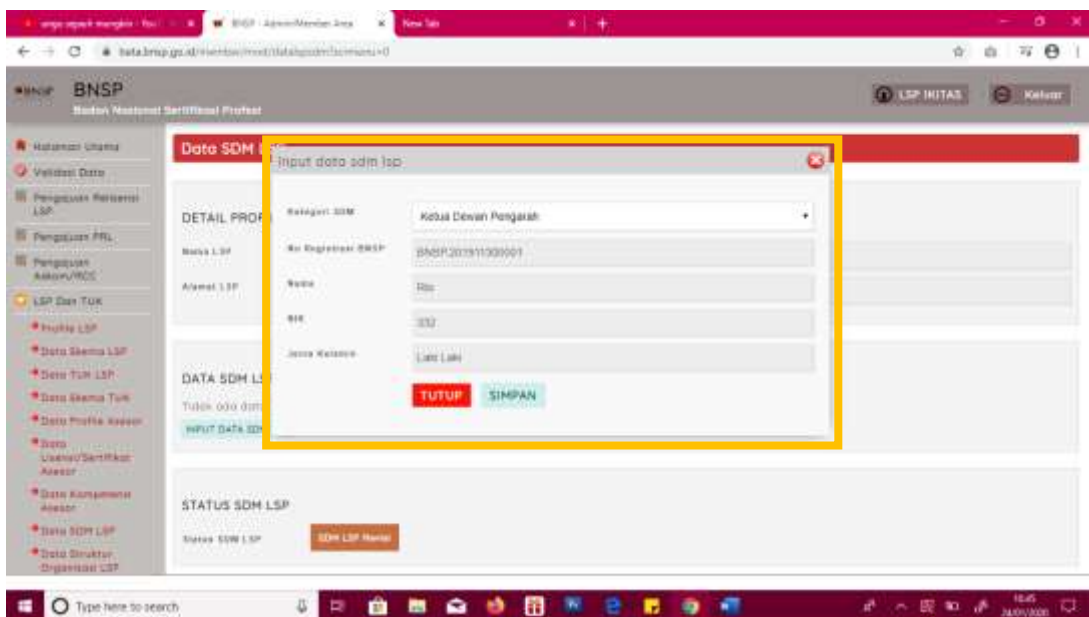


Pilih jabatan



Masukkan Nomor Registrasi BNSP, selanjutnya klik proses

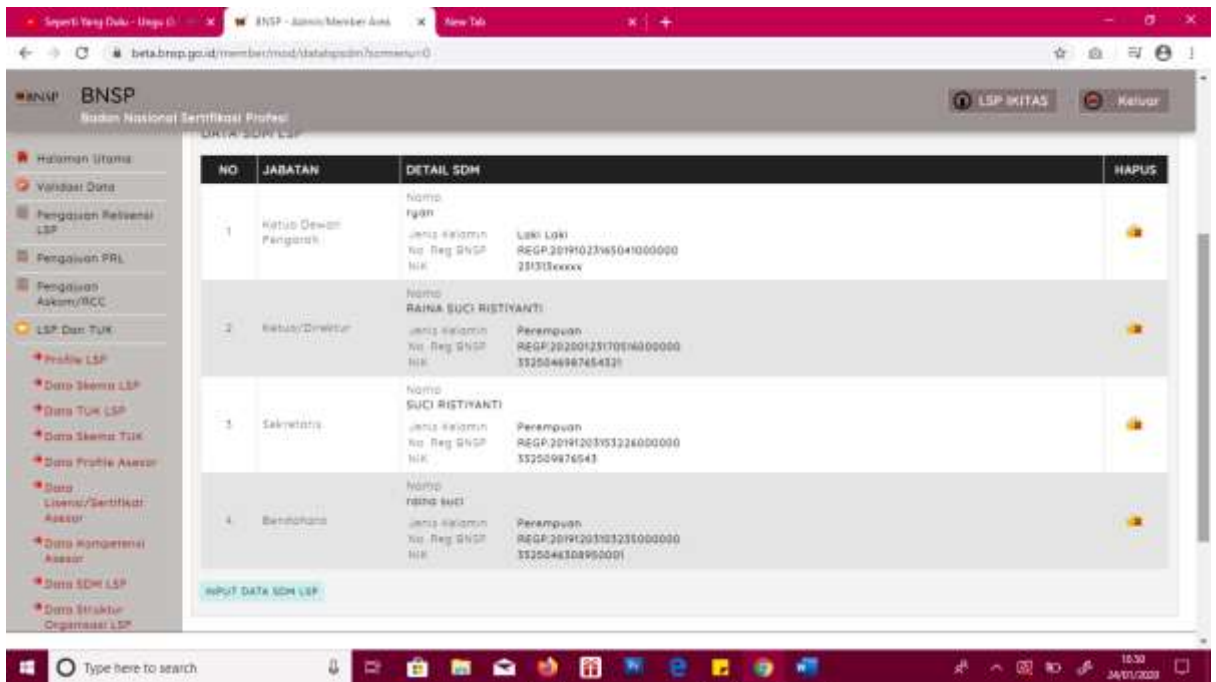
*** nomor bisa didapat dari profil user member, untuk itu setiap SDM kecuali asesor diwajibkan registrasi sebagai member pada website SISNAKER**



Setelah diinputkan, maka akan ada data NIK dan jenis kelamin user, klik simpan



Inputkan data SDM lain dengan cara yang sama

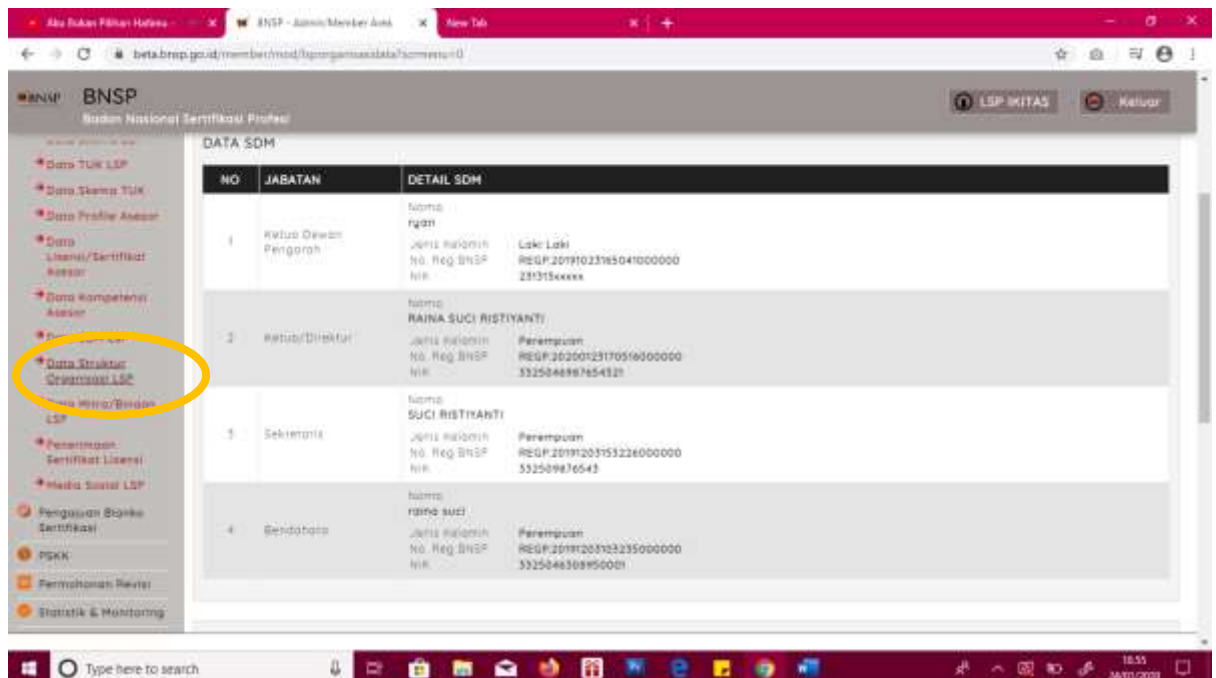


Jika semua data sudah diinput, klik

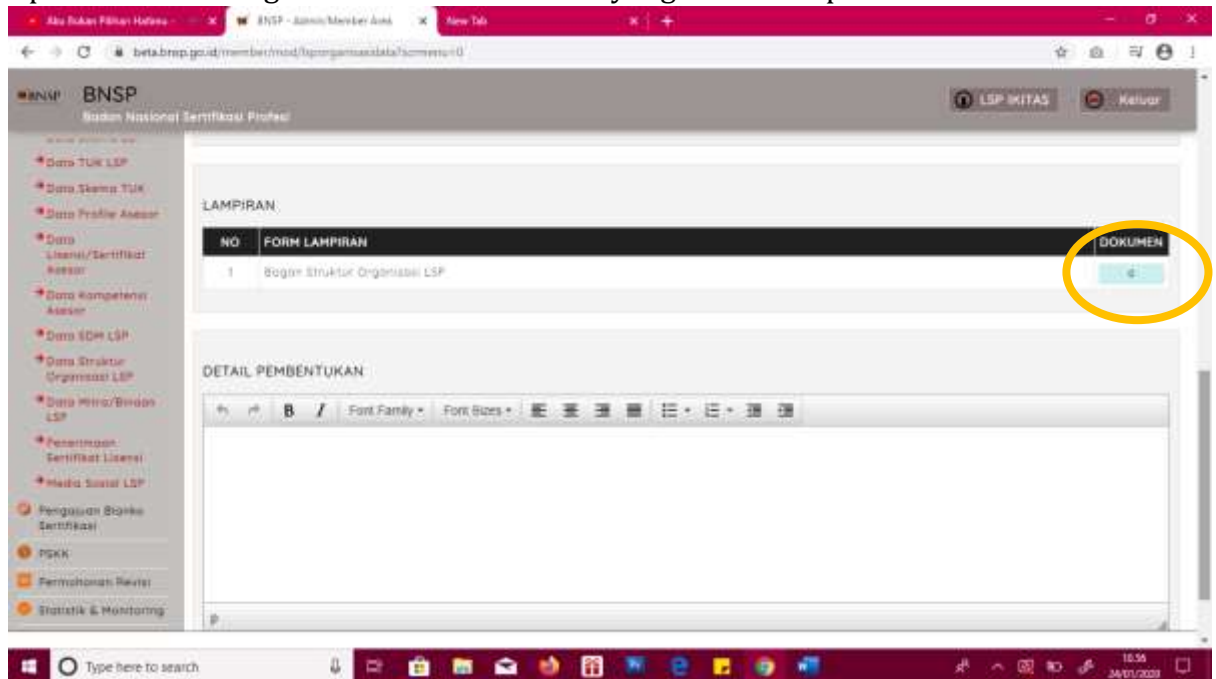
- Save draft, untuk menyimpan data dalam bentuk draft
- Submit data, untuk mensubmit data ke BNSP

9. Data Struktur Organisasi LSP

Setelah selesai update data SDM LSP, selanjutnya adalah mensubmit data struktur organisasi LSP

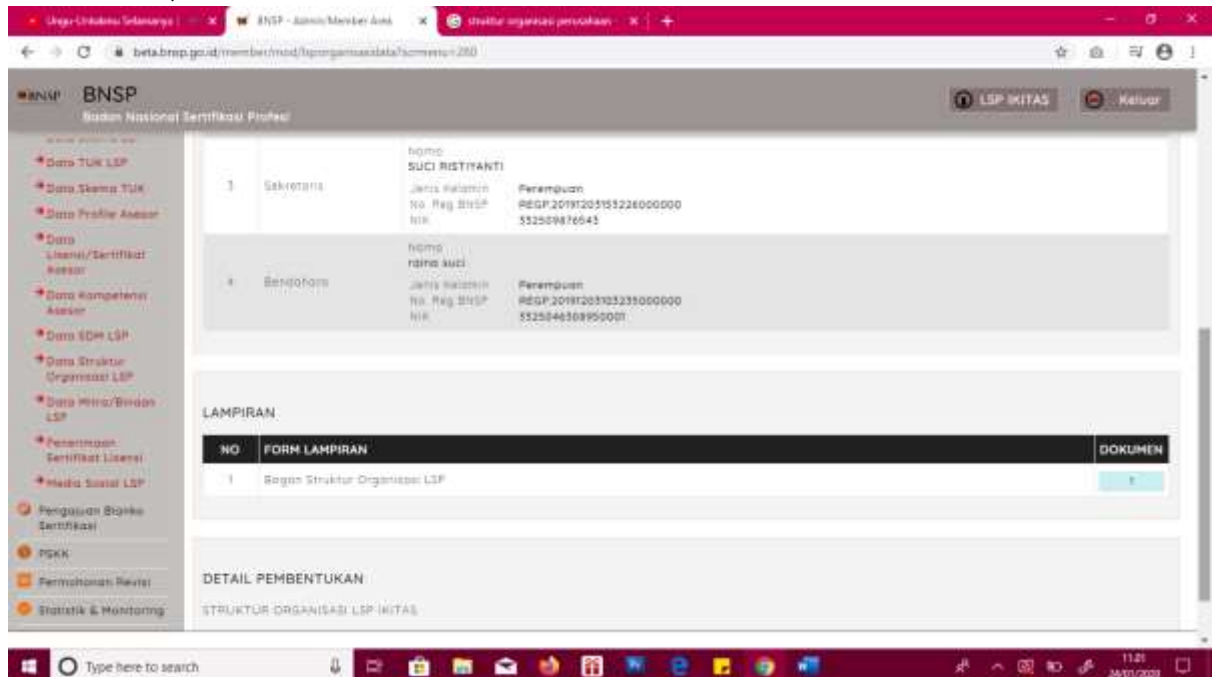


- a. Upload struktur organisasi sesuai data SDM yang sudah diinputkan



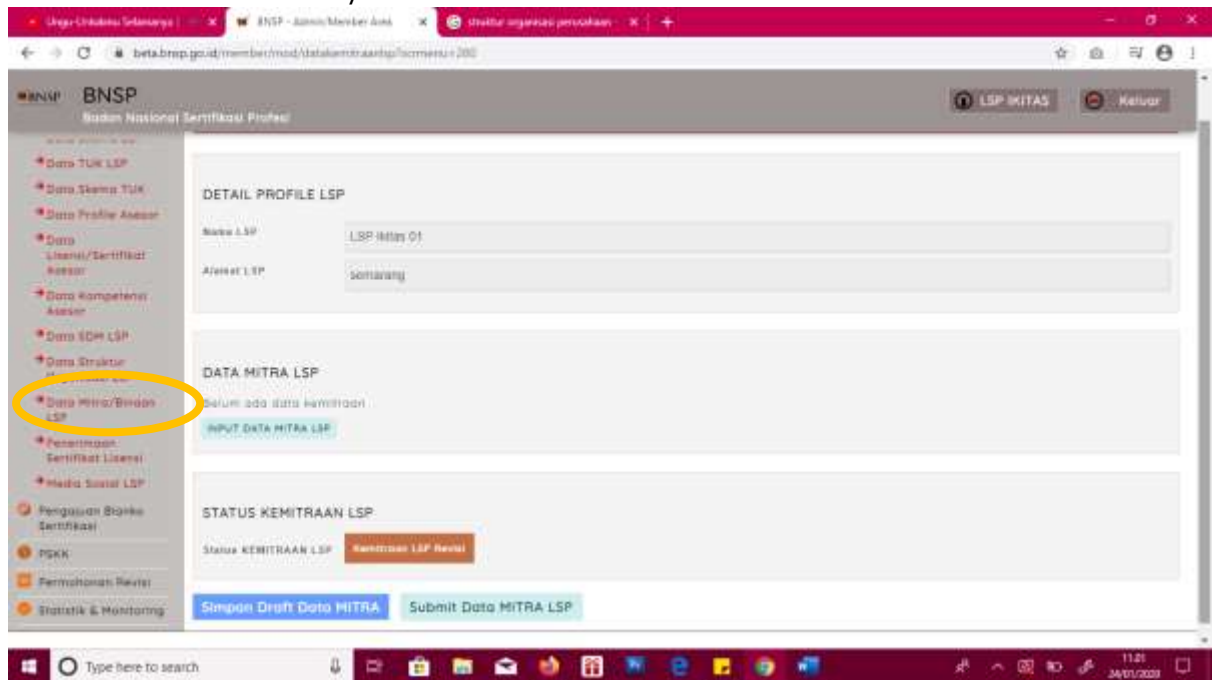
Bagan yang diupload berformat JPEG/ PNG dengan maksimal file upload adalah 3 MB

- b. Jika data sudah diupload, inputkan detail pembentukan berupa narasi
c. jika semua data sudah diinput, klik
Save draft, untuk menyimpan data dalam bentuk draft
Submit data, untuk mensubmit data ke BNSP

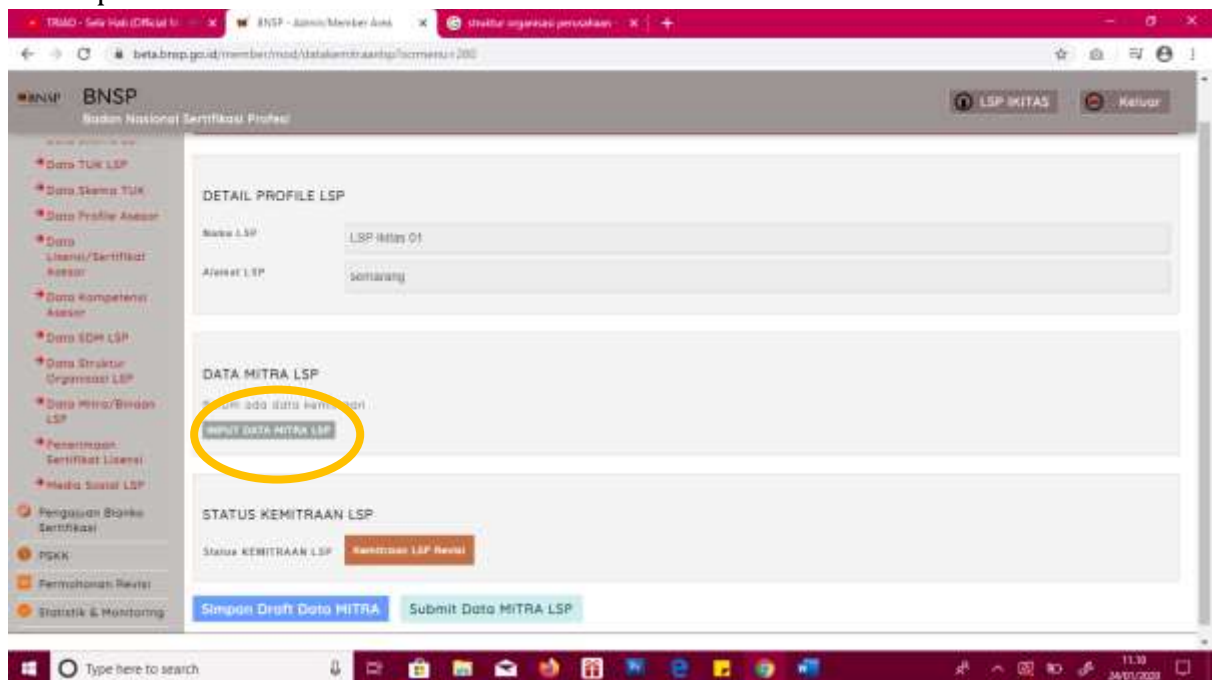


10. Data Mitra/ Binaan LSP

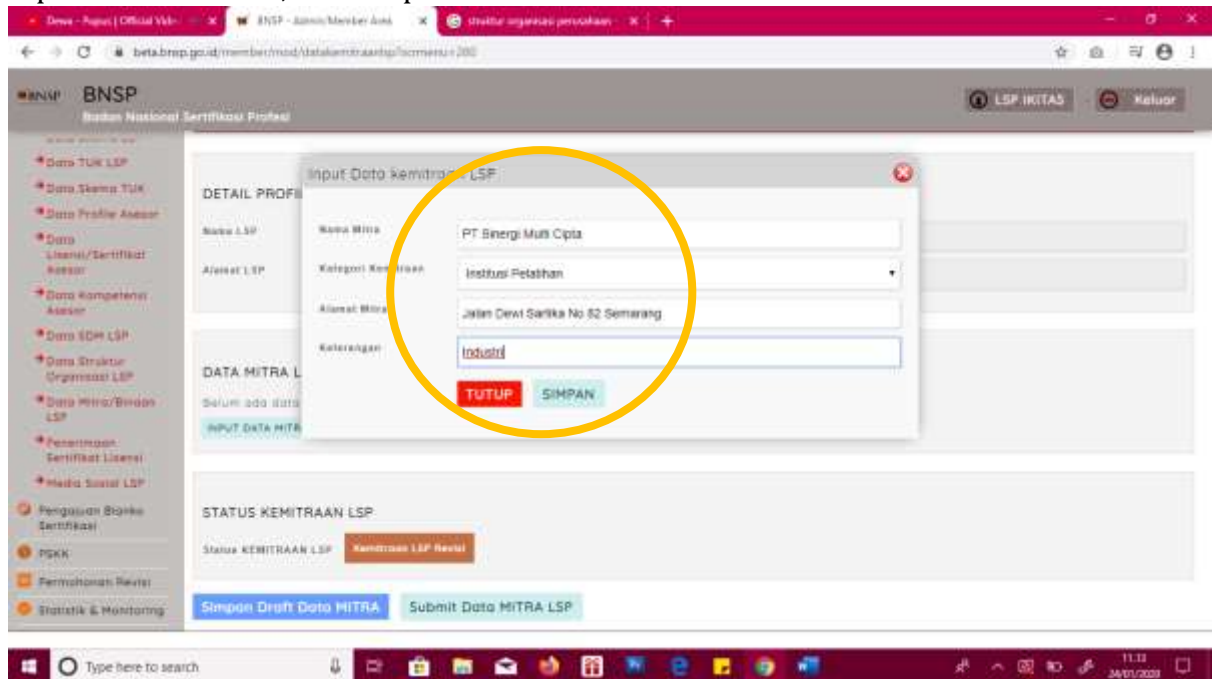
a. Klik submenu Data Mitra/ Binaan LSP



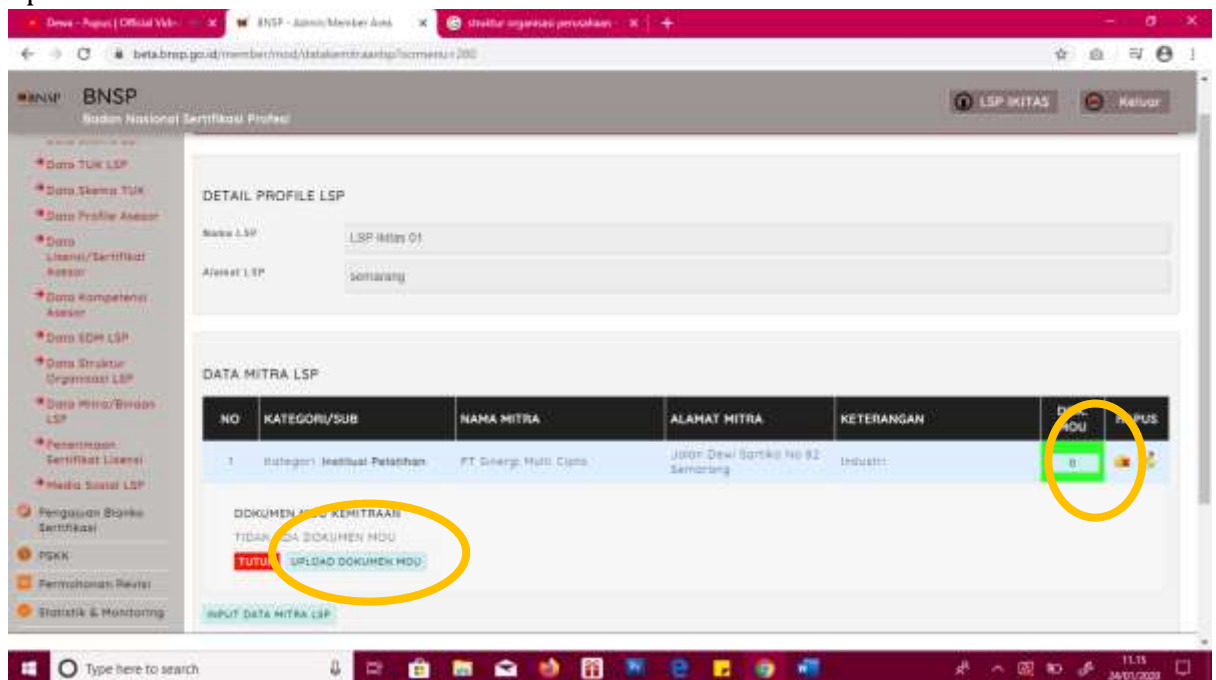
b. Klik input data Mitra LSP



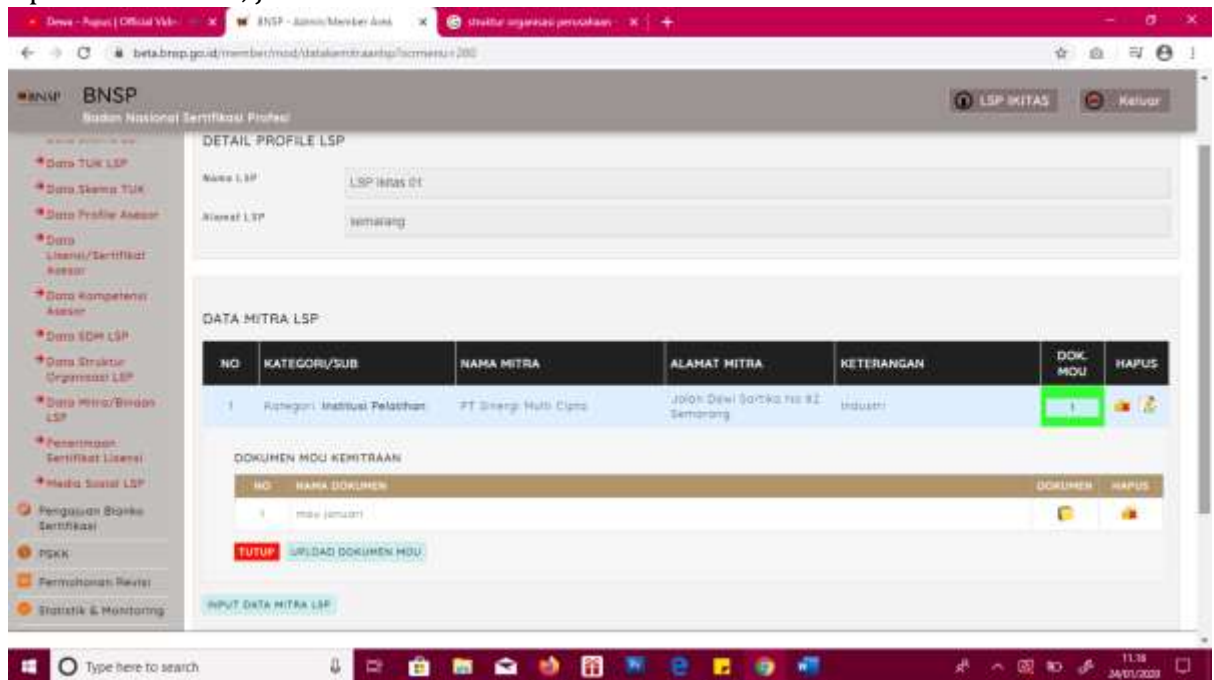
c. Inputkan data mitra, klik simpan



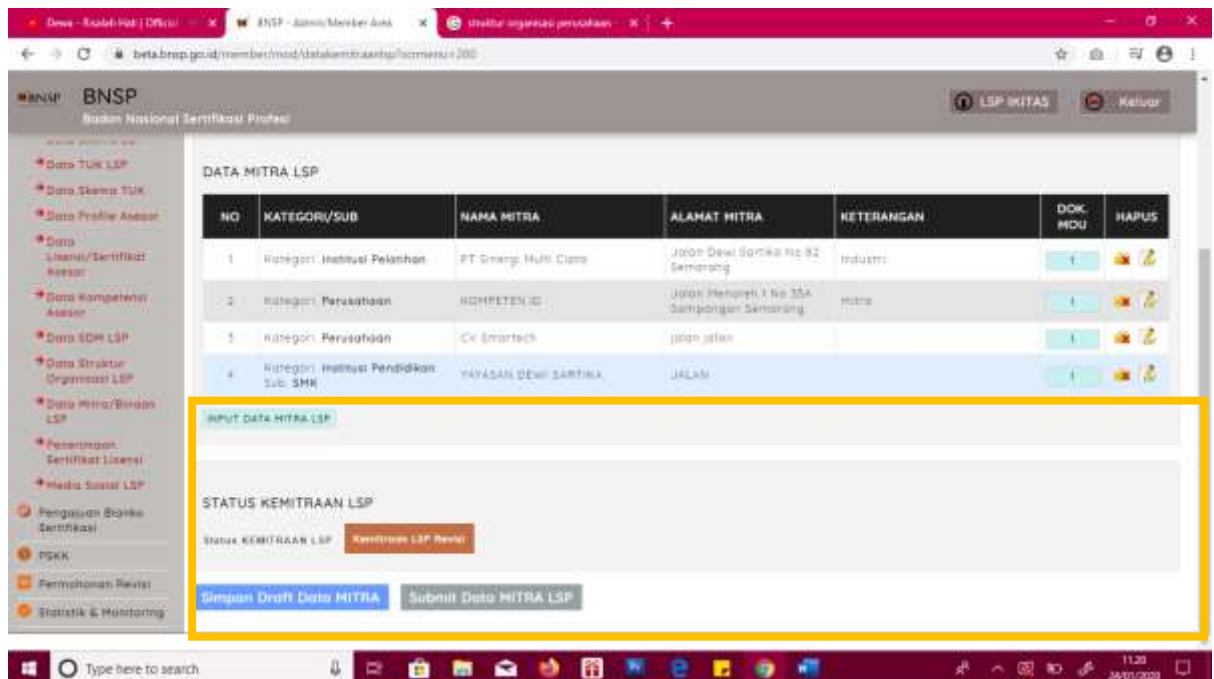
d. Inputkan dokumen MOU (bersifat wajib) dengan format PDF dan maksimal upload adalah 2 MB



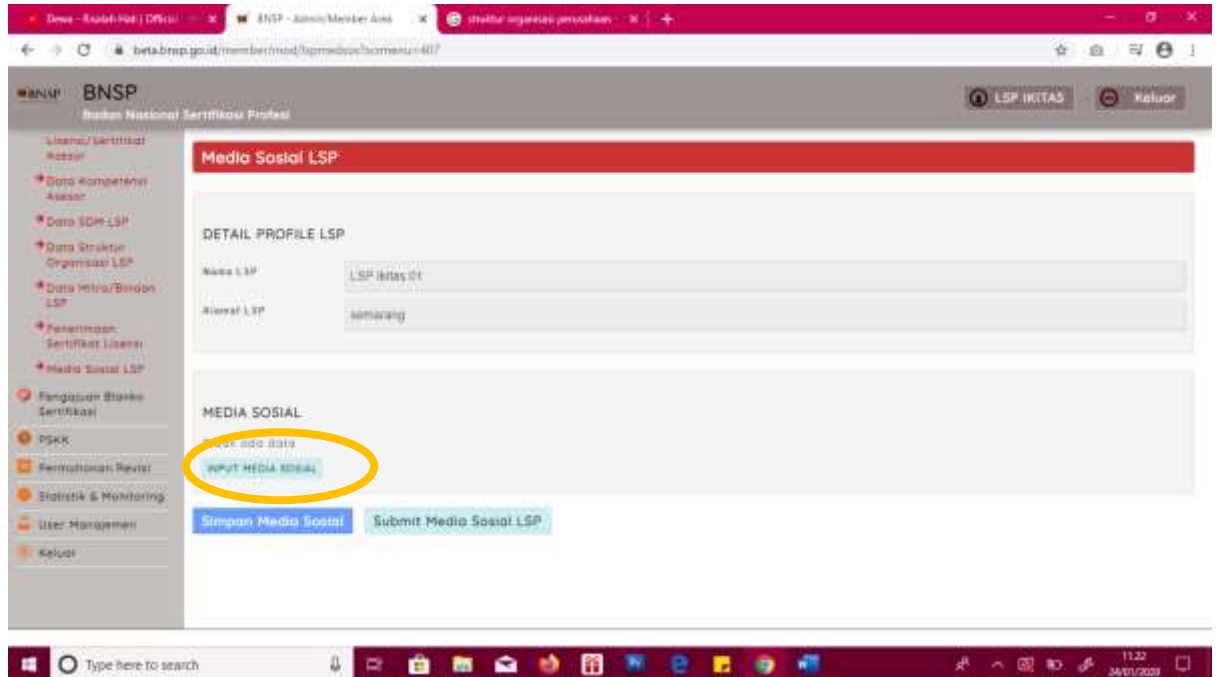
e. Upload dokumen, jika file terlalu bear bias dibuat multi dokumen



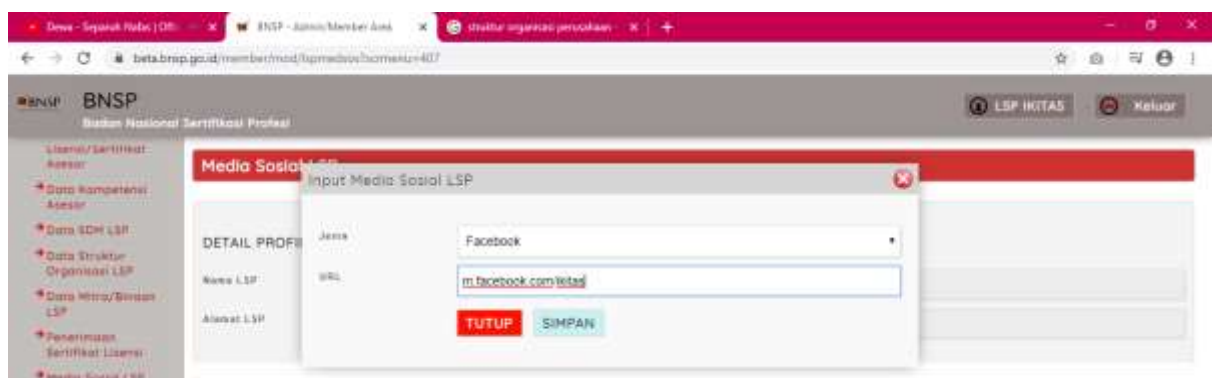
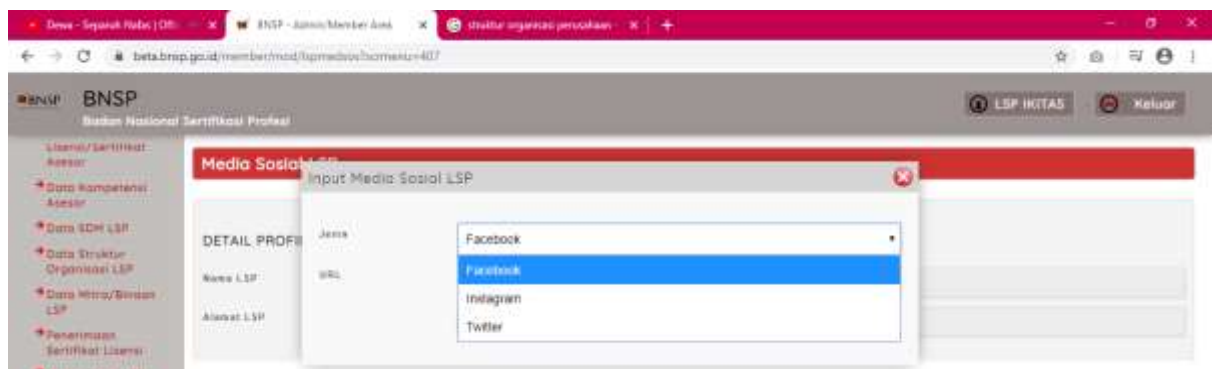
f. Inputkan Mitra lain dengan cara yang sama
Jika semua data sudah terinput jangan lupa untuk menyimpan atau submit data



11. Media Sosial LSP

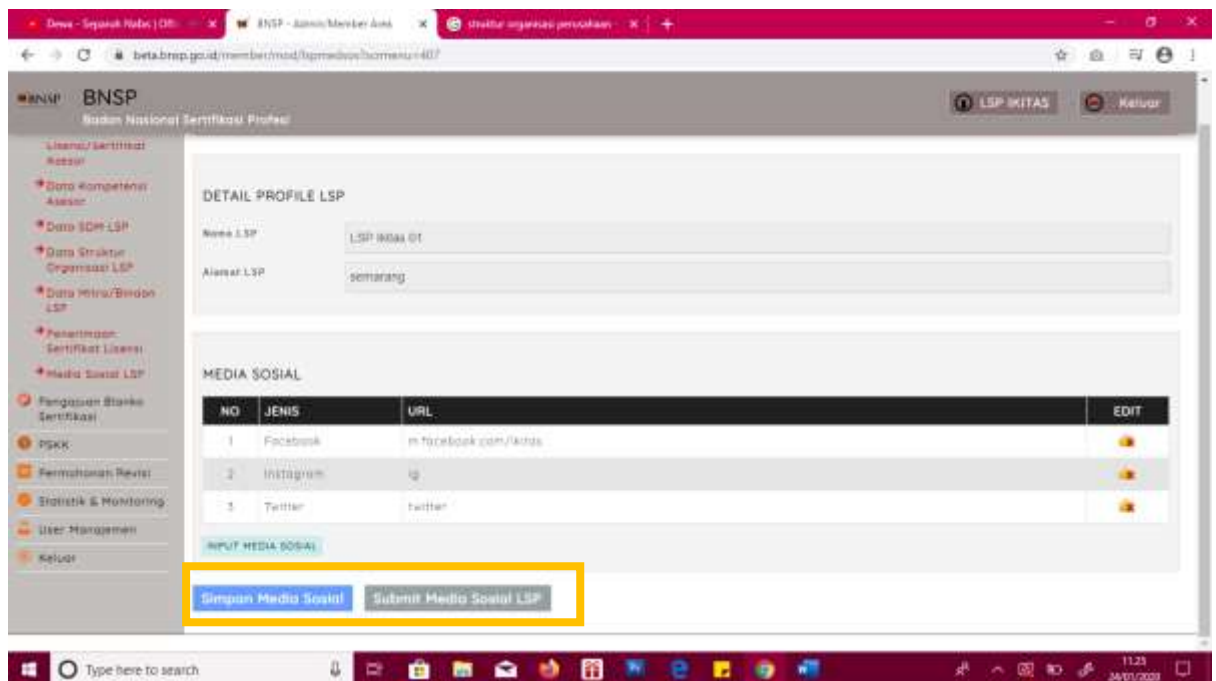


Pilih jenis media social



Klik simpan

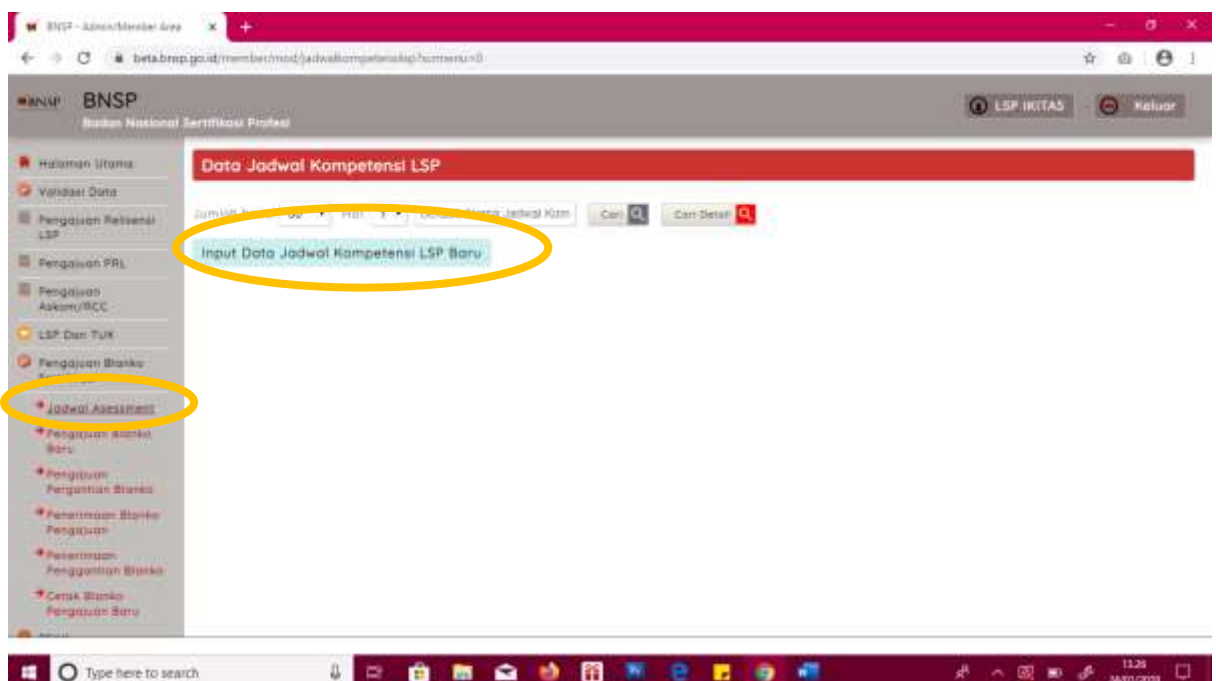
Inputkan semua data social media, jika sudah selesai klik submit/ simpan (draft)



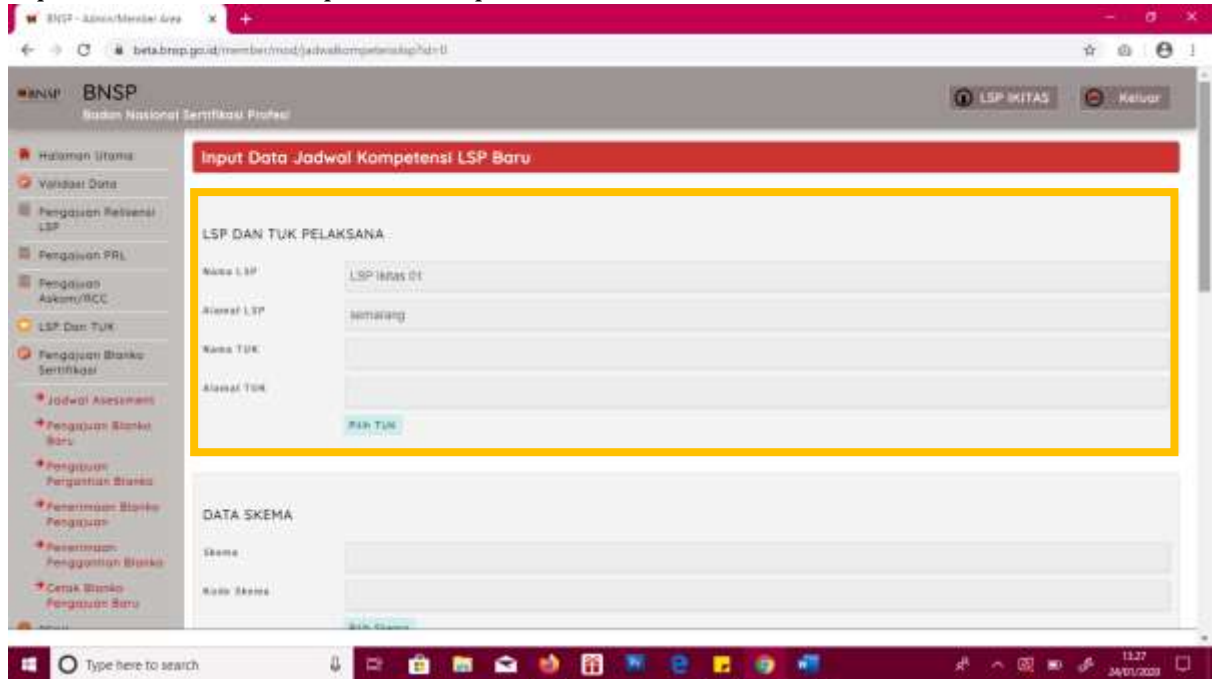
12. Pembuatan Jadwal PSKK

Pada jadwal PSKK, LSP wajib menginputkan jadwal pada menu pengajuan blanko sertifikasi. Klik menu pengajuan Blanko Sertifikasi --> pilih jadwal asesmen -

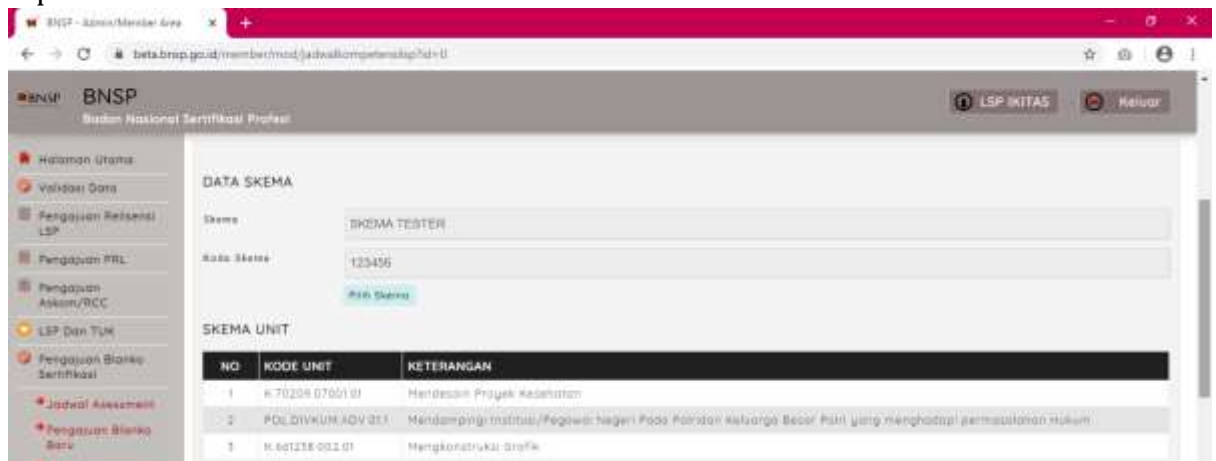
a. Input Dta Jadwal Kompetensi LSP baru



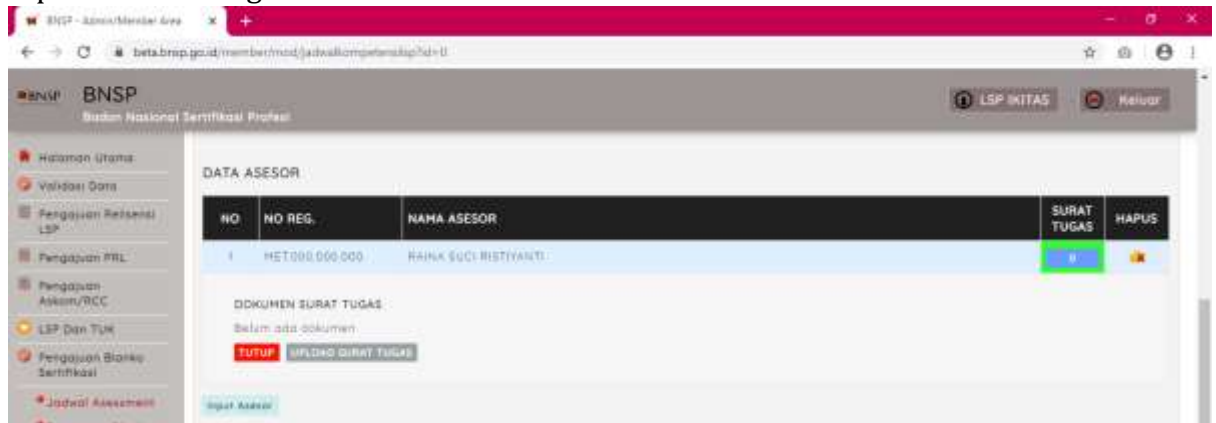
b. Inputkan LSP dan TUK pelaksana, pilih data TUK



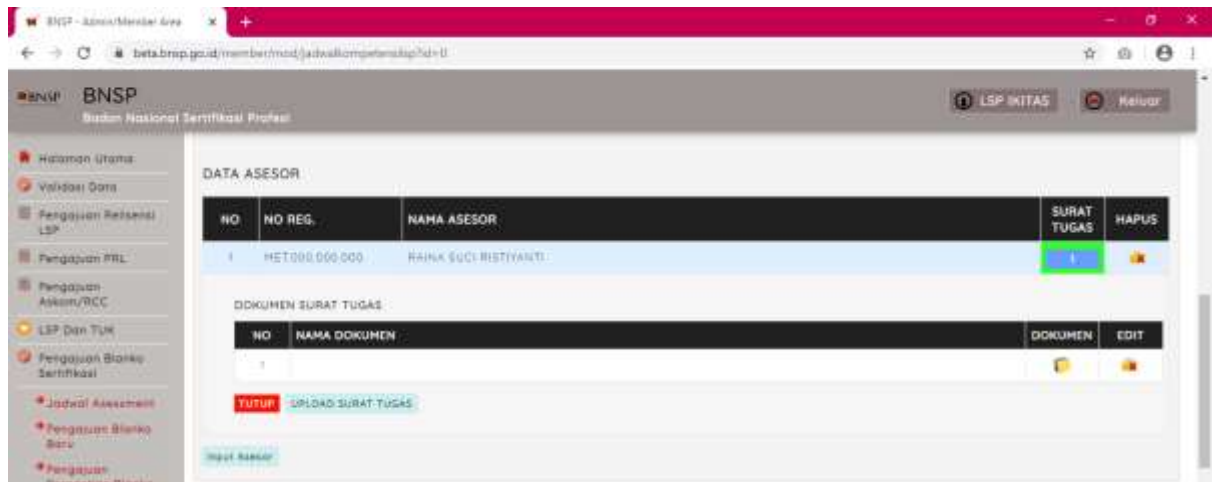
c. Inputkan data Skema



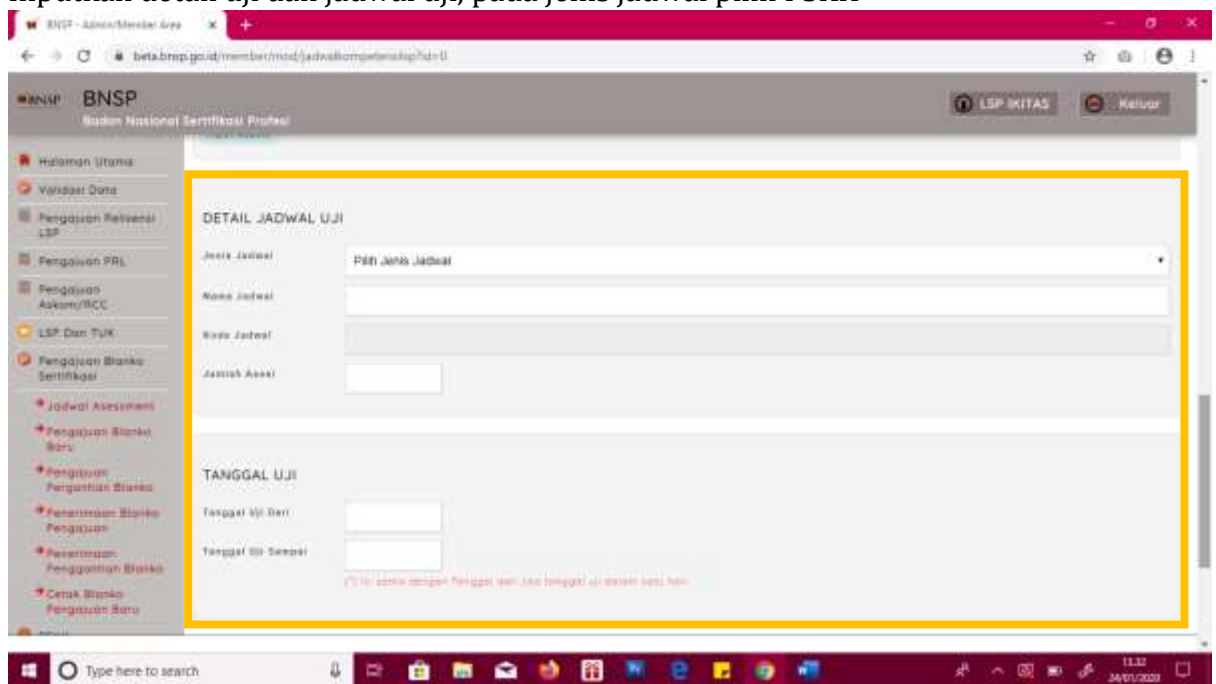
d. Inputkan surat tugas asesor



Format PDF maksimal 2MB



Inputkan detail uji dan jadwal uji, pada jenis jadwal pilih PSKK



Jika sudah selesai klik simpan draft, **untuk PSKK Jadwal tidak boleh disubmit**

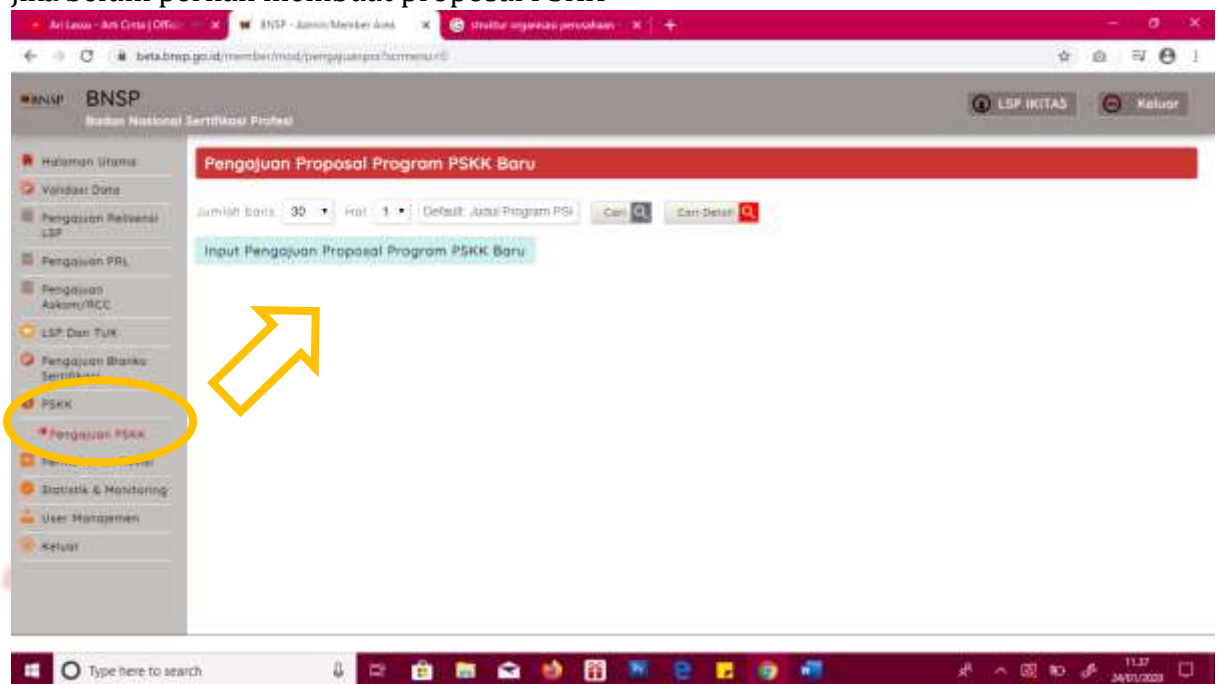
D. CEK KELENGKAPAN DATA LSP

Jika semua data sudah lengkap dan disubmit barulah LSP dapat mendaftarkan program PSKK

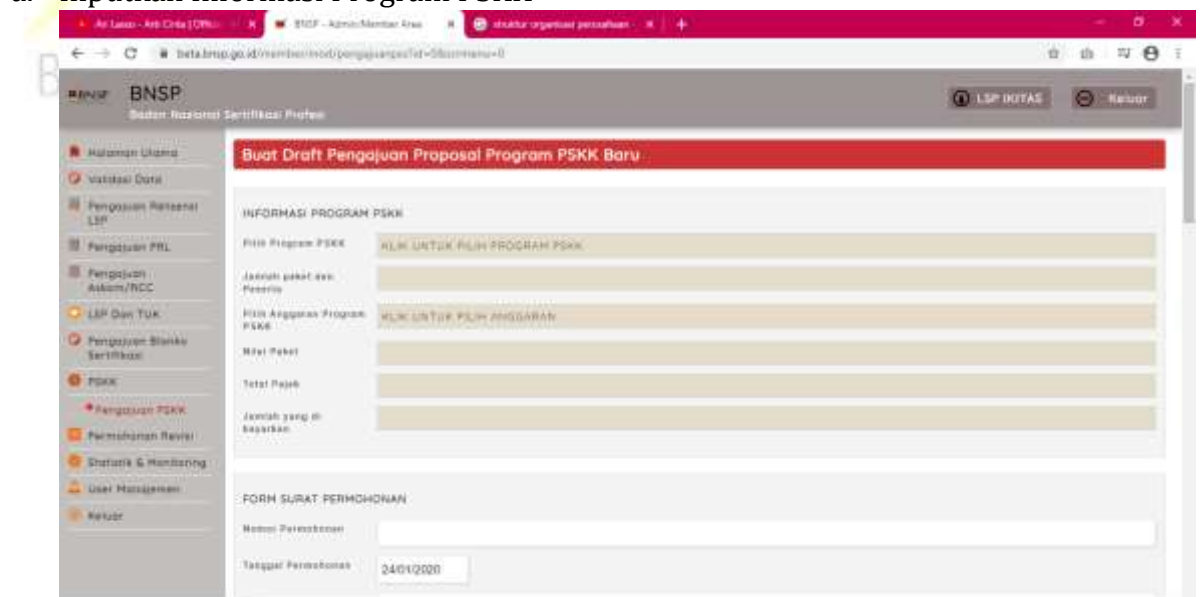
E. INPUT PROPOSAL PSKK

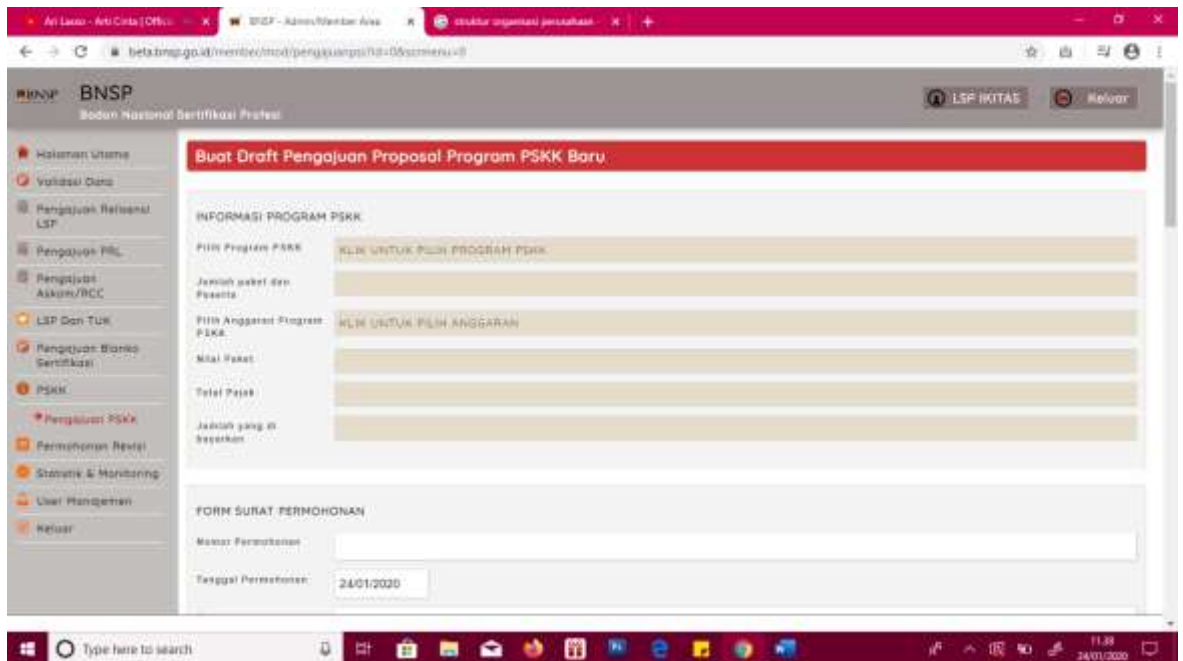
Jika Data Profil LSP sudah dilengkapi, selanjutnya adalah membuat proposal PSKK baru, berikut langkah – langkahnya :

Pertama silakan buka Menu LSP, kemudian cari menu “Pengajuan Proposal PSKK”, lalu klik, maka akan tampil halaman daftar Pengajuan Proposal PSKK, akan kosong jika belum pernah membuat proposal PSKK

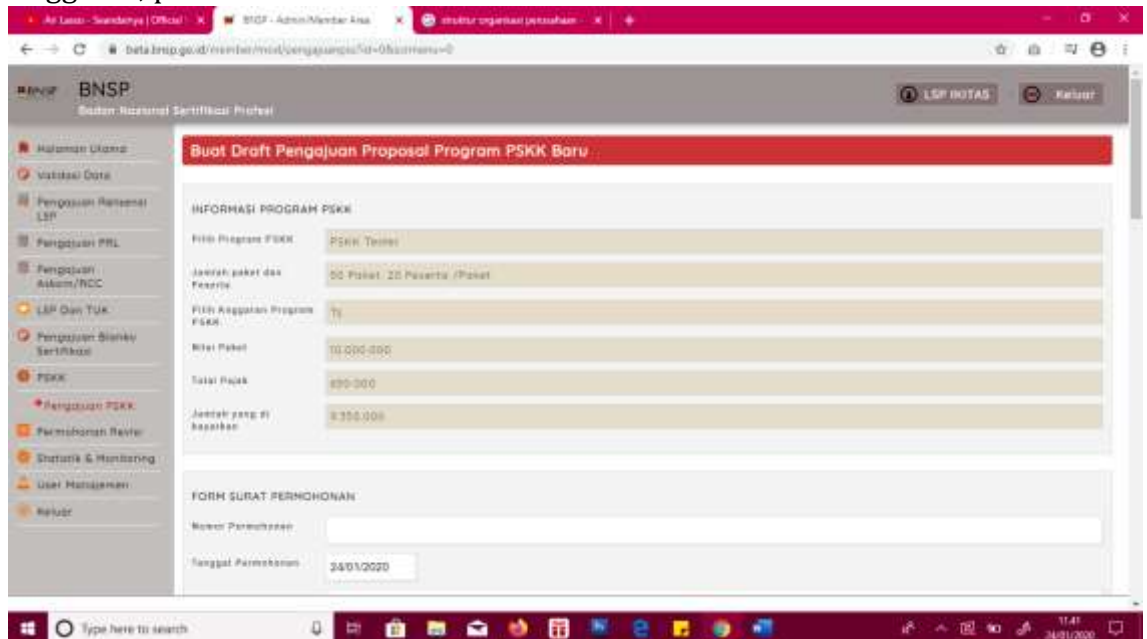


a. Inputkan Informasi Program PSKK

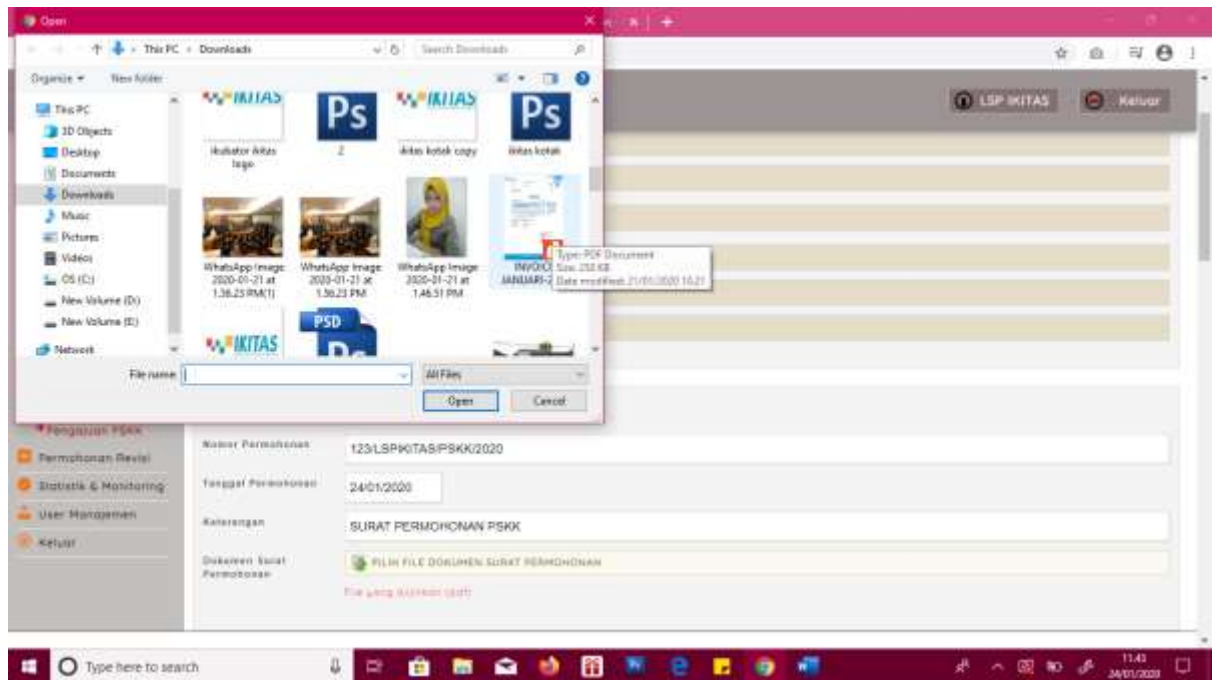




- 1) Pilih Program PSKK, diisi dengan Pilih program PSKK (pilihan disediakan BNSP)
- 2) Jumlah paket sesuai jumlah paket dari BNSP
- 3) Anggaran, pilihan dari BNSP

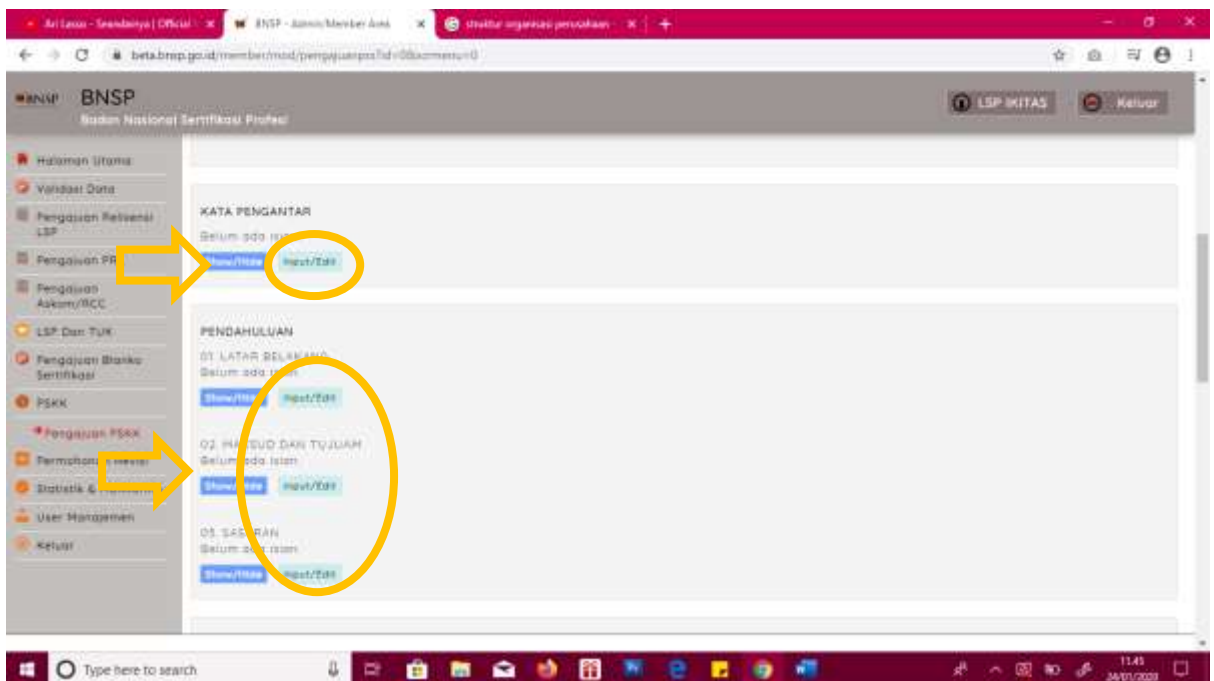


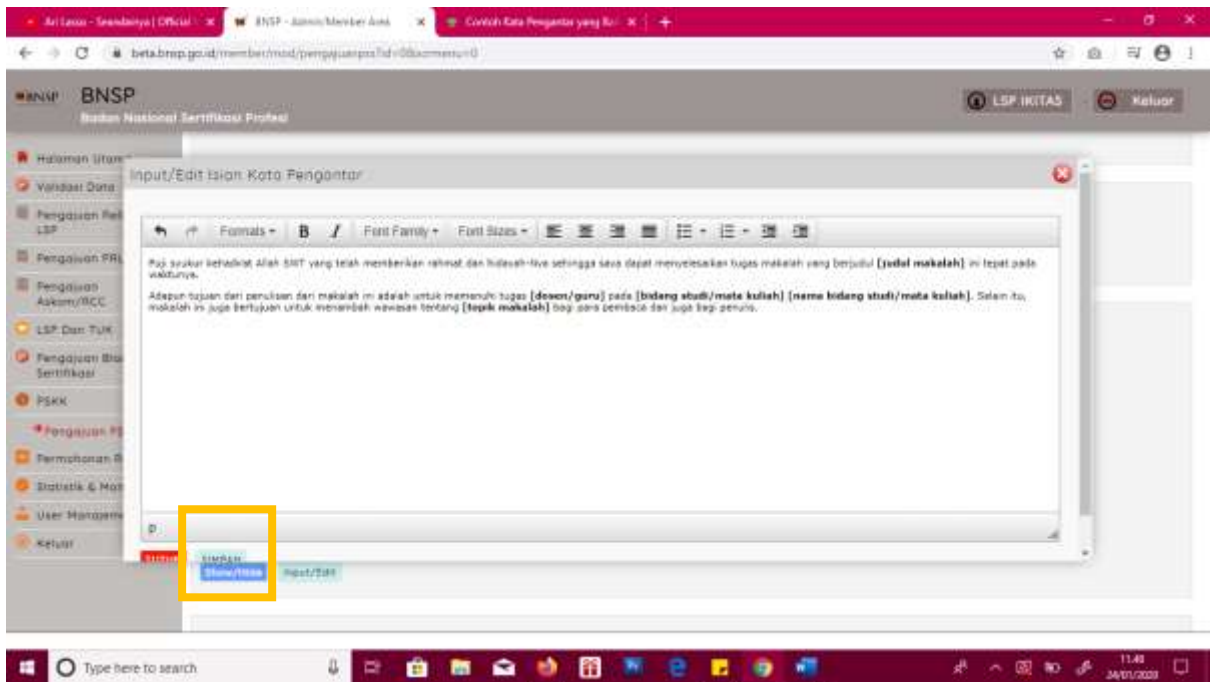
- b. Inputkan Surat permohonan, dengan maksimal File upload adalah 2MB dan file ekstensi PDF



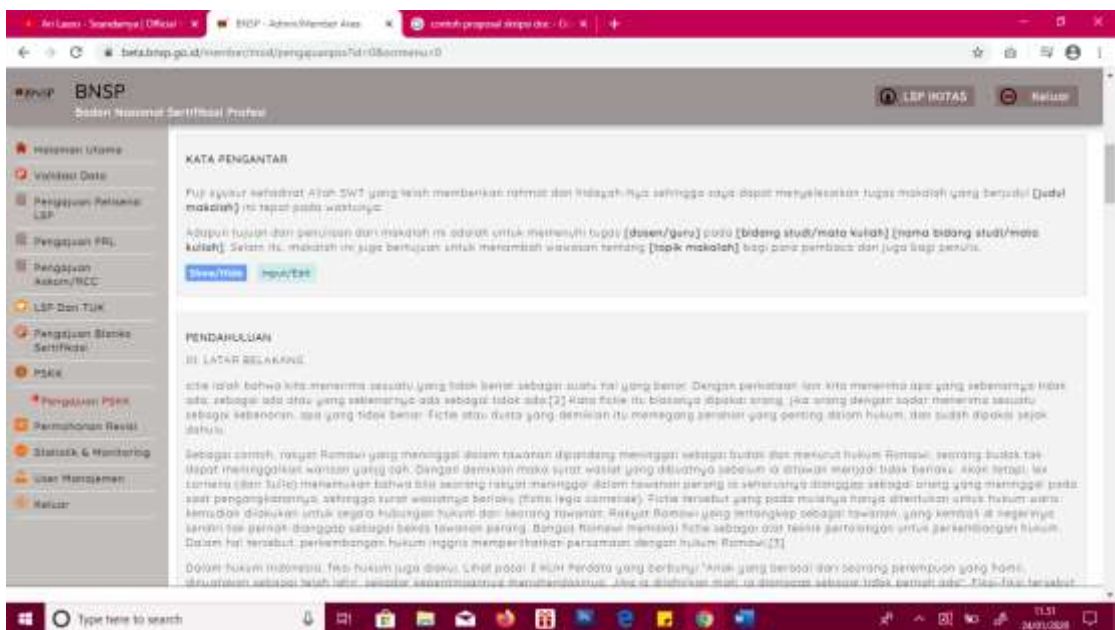
Untuk dokumen surat permohonan, bisa anda pilih dari directory penyimpanan file anda, serta diupload dengan format PDF

- c. Inputkan kata Pengantar dan Pendahuluan

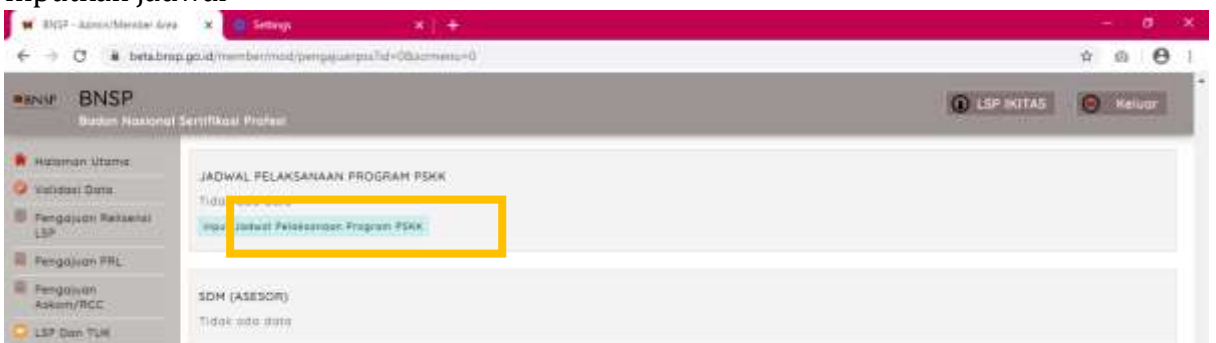




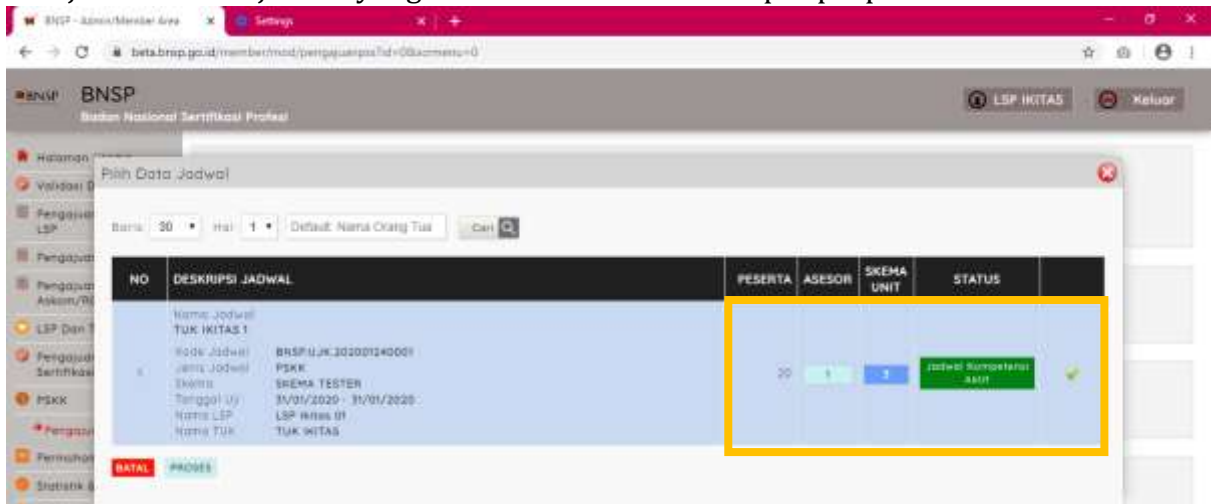
Jika sudah diinput klik simpan



d. Inputkan jadwal

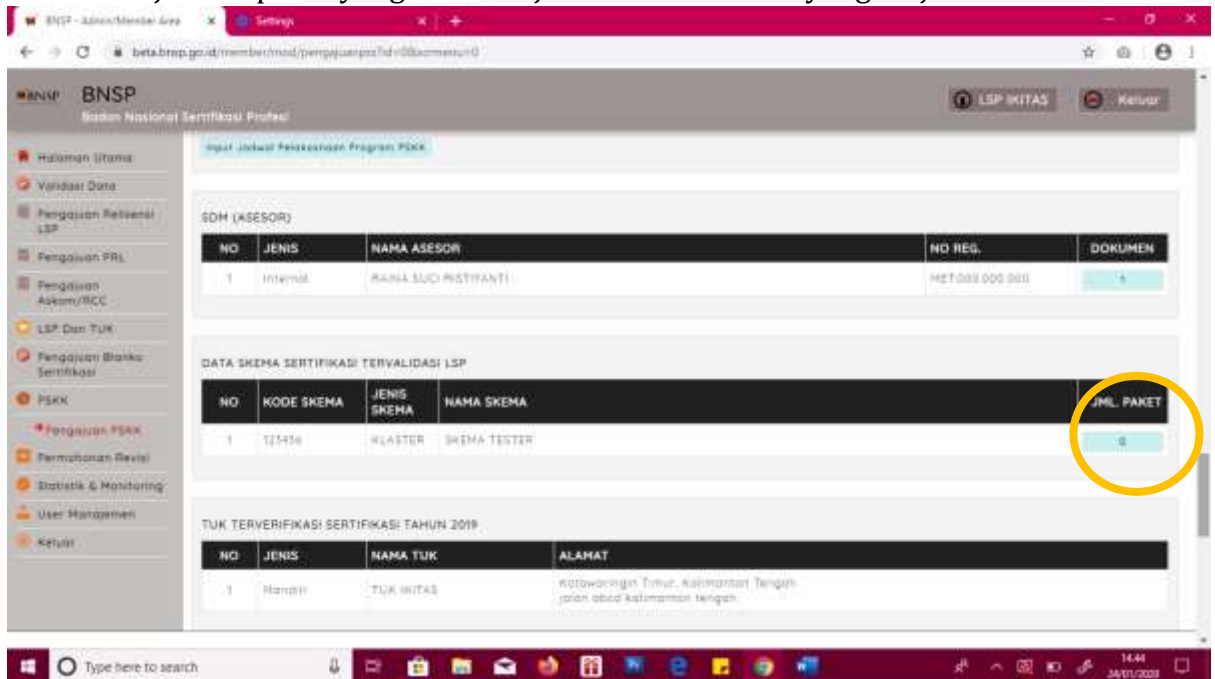


e. Klik jadwal sesuai jadwal yang sudah dibuat sebelum input proposal PSKK



Klik proses

f. Masukkan jumlah paket yang akan diajukan sesuai skema yang diajukan



jika sudah diinput klik proses

g. Inputkan data penyelenggaraan dalam bentuk narasi

The screenshot shows the BNSP member portal interface. The main content area is titled 'PENYELENGGARAAN' and is highlighted with a yellow box. It contains the following sections:

- A. TUJUAN UJI KOMPETENSI**: Sebelum ada ujian. Buttons: Show/Hide, Next/Exit.
- B. DAFTAR CALON AGEES**: Sebelum ada ujian. Buttons: Show/Hide, Next/Exit.
- C. HISTORIS REKRUITMEN CALON AGEES**: Sebelum ada ujian. Buttons: Show/Hide, Next/Exit.

At the top of the main content area, there is a table titled 'TUK TERVERIFIKASI SERTIFIKASI TAHUN 2019' with the following data:

NO	JENIS	NAMA TUK	ALAMAT
1	Handii	TUK IKITAS	Kelurahan Timur, Kalimantan Tengah Jalan abad Kalimantan Tengah

h. Inputkan semua data Lampiran (WAJIB DIISI, TIDAK BOLEH KOSONG)

The screenshot shows the BNSP member portal interface. The main content area is titled 'LAMPIRAN' and is highlighted with a yellow box. It contains a table with the following data:

NO	FORM LAMPIRAN	DOKUMEN
1	Surat Pernyataan untuk mengikuti kegiatan Program PSKK	1
2	Cepp SPWF s/n LSP	0
3	Cepp buku rekening Bank s/n LSP (masih aktif)	0
4	Surat keterangan bank yang menandakan rekening masih aktif	0
5	SK Ikatan BNSP terakhir	0
6	Lampiran Ases (PDF) sesuai format	0
7	Surat Kelulusan TUK yang terverifikasi	0
8	Dokumen kerjasama kemitraan dengan industri	0

At the bottom of the form, there are buttons: 'Kembali', 'Simpan', and 'SUBMIT'.

- i. Untuk lampiran support multi dokumen dengan file upload adalah PDF dan maksimal upload adalah 3 MB setiap File nya.
- j. Inputkan semua dokumen dan semua lampiran bersifat wajib, **data lampiran otomatis link dari profil LSP yakni:**
 - 1) SK pengangkatan Unsur Pelaksana LSP
 - 2) NPWP LSP
 - 3) Surat Keterangan Rekening aktif dari Bank
 - 4) SK penetapan Asesor beserta uraian tugas di dalamnya
 - 5) Copy Buku Rekening yang masih aktif
 - 6) SK lisensi terakhir
 - 7) Surat Keputusan Tuk yang terverifikasi
 - 8) Data Sertifikat yang telah diterbitkan (per tahun per skema)

Selain itu lampiran diupload manual dari menu PSKK

NO	FORM LAMPIRAN	DOKUMEN
1	SK Pengangkatan Unsur Pengurus Pelaksana LSP	1
2	NPWP atas Nama LSP (untuk LSP P3) atau boleh atas nama Lembaga Induk Pendiri untuk LSP P1 dan P2	1
3	Buku Rekening dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor Rekening aktif atas nama LSP (LSP P3) atau boleh atas nama Lembaga Induk Pendiri untuk LSP P1 dan P2 dari Bank terkait	1
4	SK Penetapan Asesor Kompetensi disertai uraian tugas oleh Ketua LSP	1
5	Surat Pernyataan untuk mengikuti kegiatan Program PSKK (Form 2 di Pedoman PSKK) format pdf	1
6	Copy buku rekening Bank a/n LSP (mash aktif)	1
7	SK Lisensi BNSP terakhir	1
8	Lampiran Asesi (pdf) sesuai format (Form 7 pada Pedoman PSKK)	1
9	Surat Keputusan TUK yang terverifikasi	1
10	Dokumen kerjasama LSP dengan Pihak Ketiga (Industri/Kementerian/Lembaga) format pdf	1
11	Surat Pernyataan Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun Anggaran 2021 (Form 10 di Pedoman PSKK) format pdf	1
12	Data sertifikat yang telah diterbitkan (per tahun per skema)	1

- k. Pastikan semua dokumen sudah terisi
Jika semua dokumen sudah terisi

- **Simpan**

Jika memilih Opsi Simpan, data akan otomatis tersimpan, namun proposal belum terkirim ke Tim Verivikator BNSP atau belum terdaftar ke Sistem BNSP.

Untuk opsi simpan, masih diperbolehkan untuk mengedit, atau mengubah data form proposal yang sudah tersimpan, jika ingin mengirim Form Pengajuan tersebut, anda harus melakukan SUBMIT. Yaitu dengan Klik tombol/icon "EDIT", kemudian Klik tombol "SUBMIT".

- **Submit**

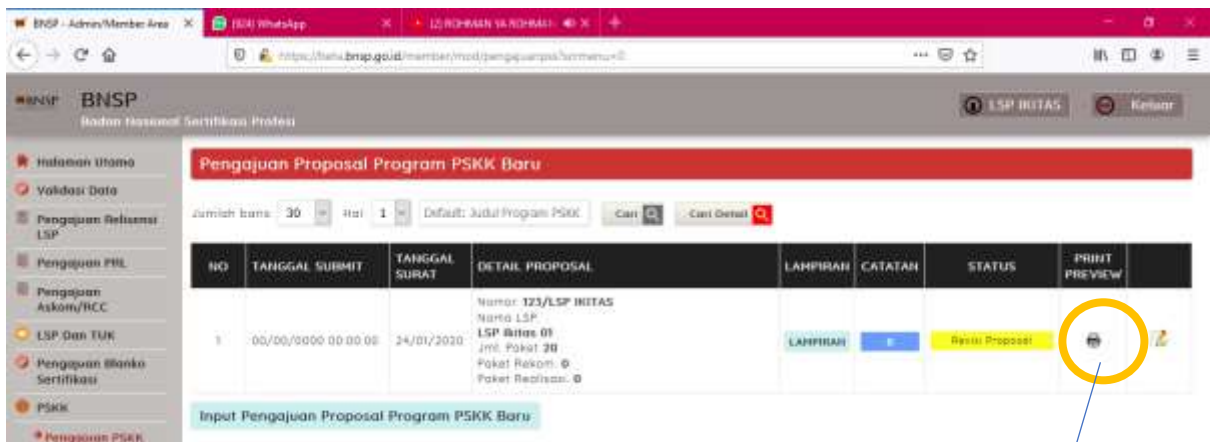
Sedangkan untuk Opsi Submit, data akan otomatis terkirim ke Sistem BNSP dan otomatis akan berganti Status “On Progres”.

Anda tidak diperbolehkan mengedit data kembali, karena data sudah terkirim untuk di verifikasi oleh Tim BNSP, dan siap untuk diproses. Bisa dipantau melalui status pengajuan tersebut

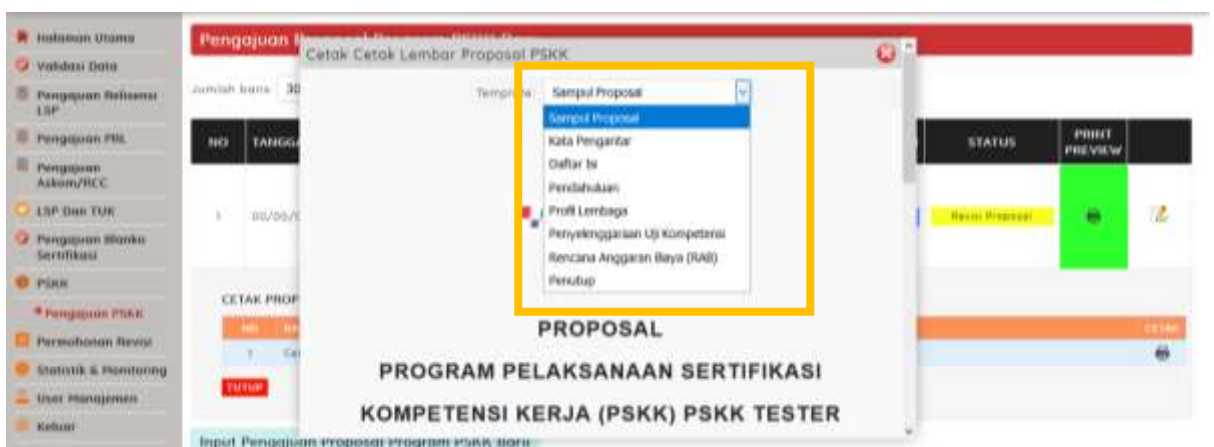
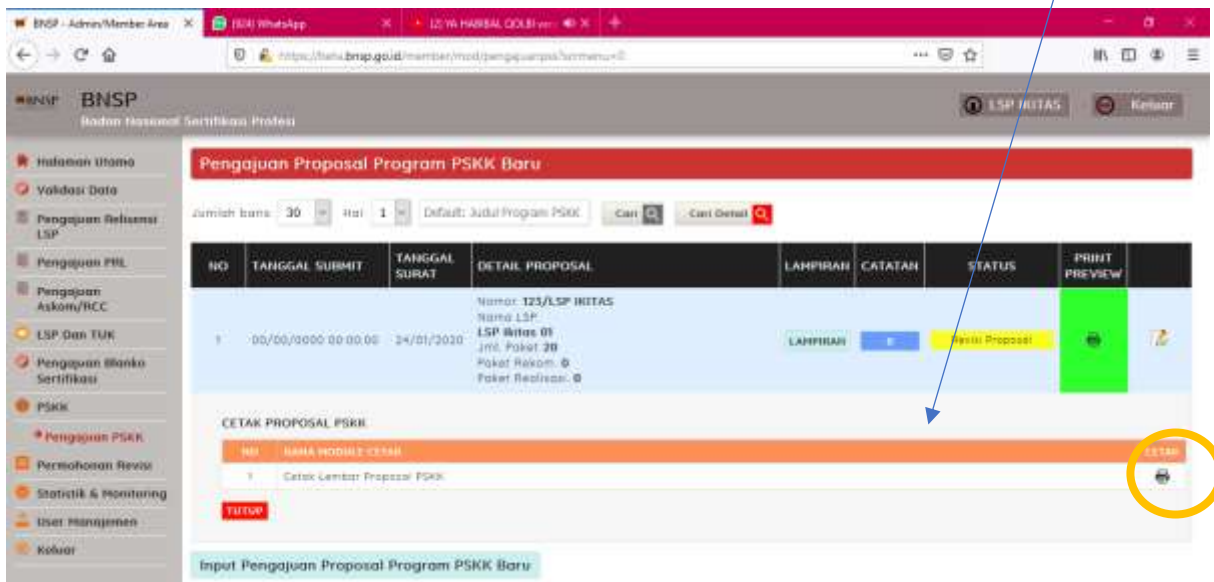


F. CETAK PROPOSAL

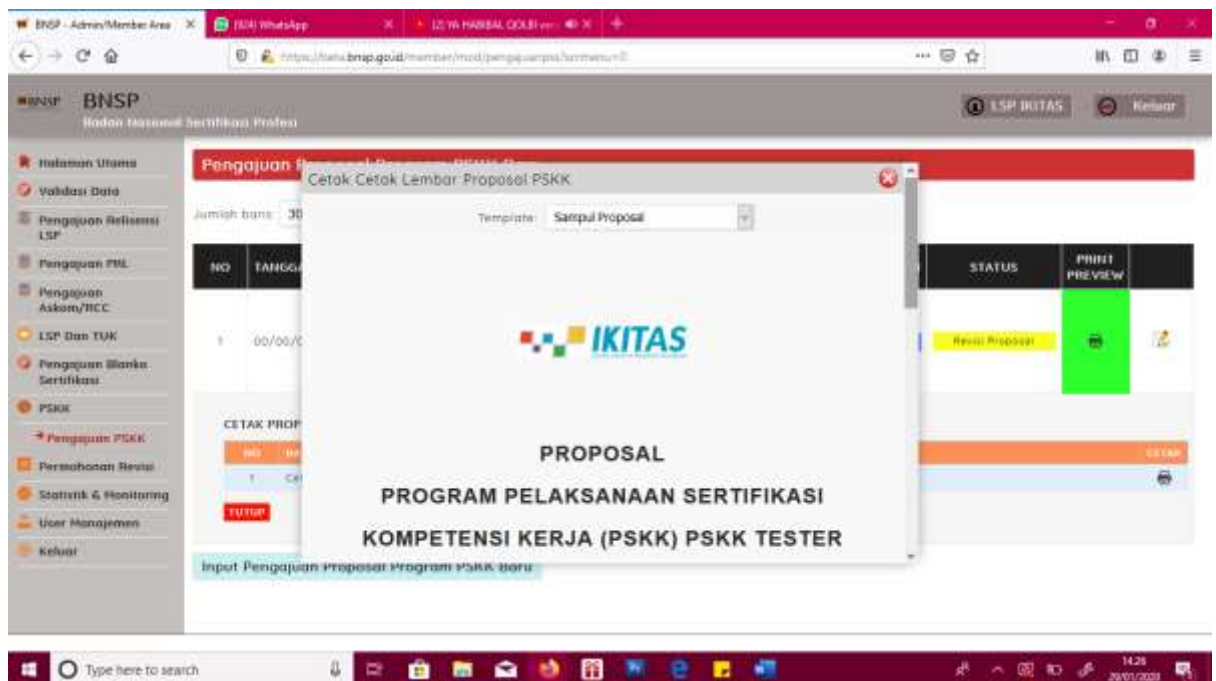
Menu cetak proposal dapat digunakan untuk proposal dalam posisi draft maupun sudah submit



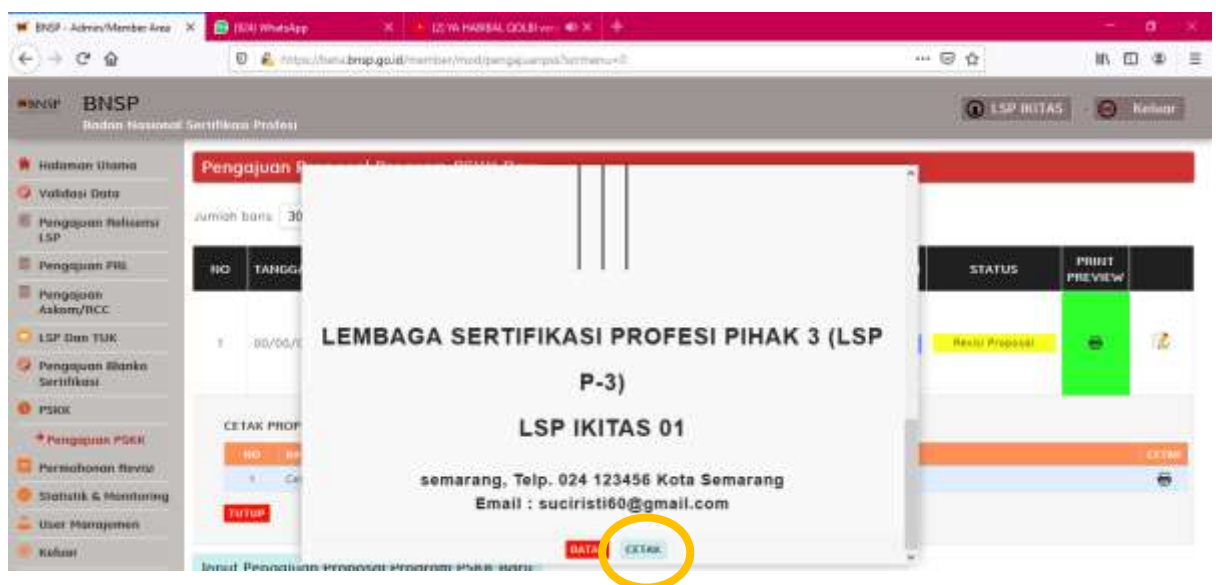
Akan muncul tampilan cetak proposal, selanjutnya klik button print



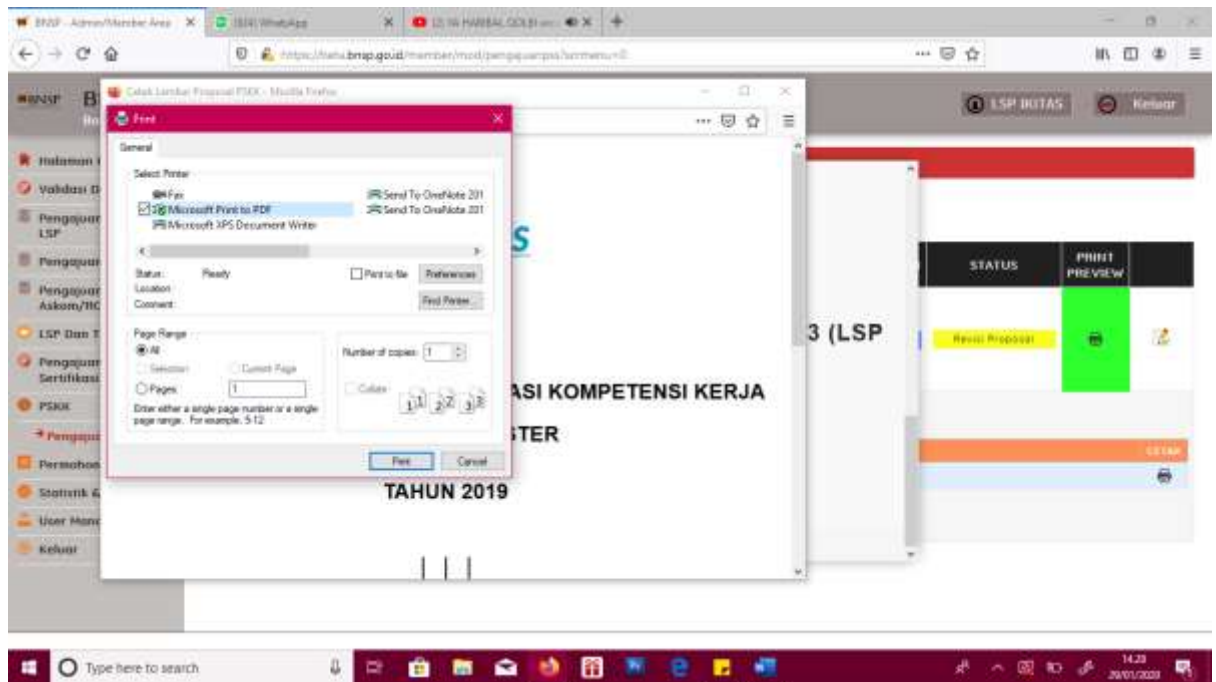
Pilih menu yang akan dicetak, missal cetak sampul



Scroll ke bawah, maka akan menemukan button cetak



Akan muncul tampilan seperti berikut (disini saya pakai browser mozilla, untuk tampilan menyesuaikan browser masing masing)



Pilih printer jika akan langsung mencetak, jika ingin menyimpan pilih saja save to PDF

***SUPAYA HASILNYA TEPAT, SETTING PADA PENGATURAN KERTAS ADALAH UKURAN A4, TATA CARA SETTING BERBEDA SETIAP BROWSER DAN LAPTOP**

G. CONTOH HASIL PROPOSAL

**DISINI PROPOSAL HANYALAH CONTOH, KONTEN TIDAK
UNTUK DITIRU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

Cetak Lembar Proposal PSKK <https://beta.bnsp.go.id/member/mod/pengajuanpsk?screen=0>



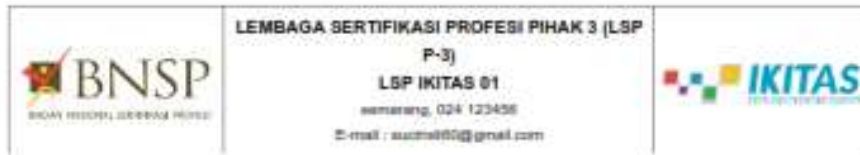
PROPOSAL
PROGRAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KERJA (PSKK) PSKK TESTER
TAHUN 2019

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 3 (LSP P-3)
LSP IKITAS 01

semarang, Telp. 024 123456 Kota Semarang
Email : suciristi60@gmail.com

1 of 1 29/01/2020, 16:21

1. Contoh Halaman Sampul



KATA PENGANTAR

Itile ialah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.[2] Kata *ficlie* itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. *Ficlie* atau *dusta* yang demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu.

Sebagai contoh, rakyat Romawi yang meninggal dalam tawanan dipandang meninggal sebagai budak dan menurut hukum Romawi, seorang budak tak dapat meninggalkan warisan yang sah. Dengan demikian maka surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, *lex cornelia* (dari Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkatannya, sehingga surat wasiatnya berlaku (*ficlio legis corneliae*). *Ficlie* tersebut yang pada mulanya hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum dari seorang tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai tawanan, yang kembali di negerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas tawanan perang. Bangsa Romawi memakai *ficlie* sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum Inggris memperlihatkan persamaan dengan hukum Romawi.[3]

Dalam hukum Indonesia, *fiksi* hukum juga diakui. Lihat pasal 3 KUH Perdata yang berbunyi "Anak yang berasal dari seorang perempuan yang hamil, dinyatakan sebagai telah lahir, sekadar kepentingannya menghendakinya. Jika ia dilahirkan mati, ia dianggap sebagai tidak pernah ada". *Fiksi-fiksi* tersebut mempunyai sidai yang tak berbahaya. Bahkan lebih daripada itu, orang dapat mengatakan bahwa *fiksi* penundang-undangan itu bukanlah *fiksi* sebenarnya melainkan dirumuskan belaka sebagai *fiksi*.

Soal "*Ignorare Legis est lata Culpa*", atau *fiksi* hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan[4] menarik untuk diperbincangkan. Jarang kita melihat *fiksi* hukum itu dalam konteks waktu dan dimana kelahirannya. *fiksi* yang kita bicarakan ini juga harus dilihat dalam konteks ke-Indonesiaan.

Kota Semarang, 24 Januari 2020
Penanggung Jawab

RAINA SUCI RISTIYANTI
Direktur LSP IKITAS 01

2. CONTOH GAMBAR Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A.Latar Belakang
	B.Maksud dan Tujuan
	C.Sasaran
BAB II	PROFIL LEMBAGA PEMOHON
	A.Struktur Organisasi
	B.Identitas LSP
	C.Skema Sertifikasi yang di laksanakan
	D.Asesor kompetensi
	E.Tempat Uji Kompetensi
	F.Metode rekrutment calon asesi
	G.Kerjasama kemitraan dengan Industri/mitra kerja
	H.Jumlah sertifikat yang diterbitkan sesuai skema yang telah diujikan
	I.Sumber Daya Manusia (SDM)
BAB III	PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
	A.Tujuan uji Kompetensi
	B.Daftar Calon Asesi
	C.Jadwal rencana Uji Kompetensi
BAB IV	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BAB V	PENUTUP

LAMPIRAN

Surat Pernyataan untuk mengikuti kegiatan Program PSKK	Copy NPWP a.n LSP	Copy buku rekening Bank a/n LSP (masih aktif)	surat keterangan bank yang menandakan rekening masih aktif	SK lisensi BNSP terakhir	Lampiran Asesi (PDF) sesuai format	Surat Keputusan TUK yang terverifikasi	Dokumen kerjasama kemitraan dengan industri
--	----------------------------	--	---	-----------------------------------	--	---	---

3. CONTOH GAMBAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ictie ialah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.[2] Kata fictie itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. Fictie atau dusta yang demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu.

Sebagai contoh, rakyat Romawi yang meninggal dalam tawanan dipandang meninggal sebagai budak dan menurut hukum Romawi, seorang budak tak dapat meninggalkan warisan yang sah. Dengan demikian maka surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, *lex cornelia* (dari Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkatannya, sehingga surat wasiatnya berlaku (*fictio legis corneliae*). Fictie tersebut yang pada mulanya hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum dari seorang tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai tawanan, yang kembali di negerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas tawanan perang. Bangsa Romawi memakai fictie sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum Inggris memperlihatkan persamaan dengan hukum Romawi.[3]

Dalam hukum Indonesia, fiksi hukum juga diakui. Lihat pasal 3 KUH Perdata yang berbunyi "Anak yang berasal dari seorang perempuan yang hamil, dinyatakan sebagai telah lahir, sekadar kepentingannya menghendakinya. Jika ia dilahirkan mati, ia dianggap sebagai tidak pernah ada". Fiksi-fiksi tersebut mempunyai sidat yang tak berbahaya. Bahkan lebih daripada itu, orang dapat mengatakan bahwa fiksi perundang-undangan itu bukanlah fiksi sebenarnya melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi.

Soal "*Ignorare Legis est lata Culpa*", atau fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan[4] menarik untuk diperbincangkan. Jarang kita melihat fiksi hukum itu dalam konteks waktu dan dimana kelahirannya. fiksi yang kita bicarakan ini juga harus dilihat dalam konteks ke-Indonesiaan.

B. Maksud dan Tujuan

ictie ialah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak

surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, *lex cornelia* (dari Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkatannya, sehingga surat wasiatnya berlaku (*fictio legis corneliae*). Fictio tersebut yang pada mulanya hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum dari seorang tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai tawanan, yang kembali di negerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas tawanan perang. Bangsa Romawi memakai fictio sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum Inggris memperlihatkan persamaan dengan hukum Romawi.[3]

Dalam hukum Indonesia, fiksi hukum juga diakui. Lihat pasal 3 KUH Perdata yang berbunyi "Anak yang berasal dari seorang perempuan yang hamil, dinyatakan sebagai telah lahir, sekadar kepentingannya menghendakinya. Jika ia dilahirkan mati, ia dianggap sebagai tidak pernah ada". Fiksi-fiksi tersebut mempunyai sidat yang tak berbahaya. Bahkan lebih daripada itu, orang dapat mengatakan bahwa fiksi perundang-undangan itu bukanlah fiksi sebenarnya melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi.

Soal "*Ignorare Legis est lata Culpa*". atau fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan[4] menarik untuk diperbincangkan. Jarang kita melihat fiksi hukum itu dalam konteks waktu dan dimana kelahirannya. fiksi yang kita bicarakan ini juga harus dilihat dalam konteks ke-Indonesiaan.

4. CONTOH PENDAHULUAN

BAB II
PROFIL LEMBAGA PEMOHON

A. Struktur organisasi LSP P-3

STRUKTUR ORGANISASI LSP IKITAS

B. Identitas LSP

Nama LSP	: LSP P-3 LSP Ikitas 01
Tanggal Pendirian	: 27 Februari 2016
Nomor Akte Notaris	: 12345678
Alamat	: Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah Telp. 024 123456
Nomor dan tanggal Lisensi	: 123, 14 Mei 2018
Ruang Lingkup Lisensi	: 1 KLASTER SKEMA TESTER.
Nama Ketua Dewan Pengarah	: ryan
Nama Ketua/Direktur LSP	: RAINA SUCI RISTIYANTI

C. Skema Sertifikasi yang dilaksanakan:

NO.	SKEMA SERTIFIKASI	PENETAPAN OLEH BNSP (NOMOR, TANGGAL/TAHUN)	NAMA UNIT KOMP	BAHAN UJI
123456	SKEMA TESTER	JJJJ	1 Mendesain Proyek Kesehatan Mendampingi Institusi/Pegawai Negeri Pada Polridan Keluarga Besar Polri yang menghadapi permasalahan Hukum 2 3 Mengkonstruksi Grafik	-

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) LSP

NO	NAMA	JABATAN	NO.SERI SERTIFIKAT ASESOR/ NO SK SEBAGAI TENAGA IT/ADM
1	ryan	Ketua Dewan Pengarah	
2	RAINA SUCI RISTİYANTI	Ketua/Direktur	
3	SUCI RISTİYANTI	Sekretaris	
4	raina suci	Bendahara	

E. Tempat Uji Kompetensi

Tempat Uji Kompetensi terverifikasi yang digunakan untuk uji kompetensi oleh LSP

NO.	NAMA TUK	SKEMA	ALAMAT	TELP.
1	TUK IKITAS	SKEMA TESTER	jalan abcd kalimantan tengah	086778654321

Catatan : Ruang Lingkup Skema sesuai dengan nomor pada Skema sertifikasi.

F. Metode Rekrutmen Calon Asesi

Metode Rekrutmen Calon Asesi adalah

Dalam Sejarah Hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis. jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi munculah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam satu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibikin oleh badan publik. hal itu memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat.

Lalu bagaimana kira-kira bila dibandingkan dengan konteks Indonesia? Pertama, soal geografis adalah pembeda yang paling tajam antara NKRI dengan Negara-negara Eropa daratan yang relatif kecil. Pembeda kedua adalah Identifikasi Sosial masyarakat yang beragam berdasarkan suku dan penerimaannya terhadap hukum negara.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana proses legal making di ruang legislator. Misalnya, apakah pembuatan UU yang berkaitan dengan pertambangan melibatkan masyarakat adat atau aspirasi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Papua dst. Soal akses masyarakat terhadap pembentukan UU itu satu hal saja. hal lain yaitu bagaimana sosialisasi pemerintah terhadap UU yang telah diundangkan. Apakah dengan hanya perintah untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, dll, dapat menjamin masyarakat mengetahui adanya peraturan yang diundangkan tersebut.

G. Kerjasama Kemitraan Dengan Industri/Mitra Kerja

NO.	JENIS INSTITUSI	JUMLAH
1	Institusi Pendidikan	1
2	Institusi Pelatihan	1
3	Perusahaan	2

H. Jumlah Sertifikat yang diterbitkan sesuai skema yang telah diujikan

NO	NAMA SKEMA	TAHUN TERBIT SERTIFIKAT	JUMLAH
----	------------	-------------------------	--------

5. CONTOH GAMBAR PROFIL

BAB III

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

A. Tujuan Uji Kompetensi

Dalam Sejarah Hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis, jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi munculah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam satu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibikin oleh badan publik, hal itu memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat.

Lalu bagaimana kira-kira bila dibandingkan dengan konteks Indonesia? Pertama, soal geografis adalah pembeda yang paling tajam antara NKRI dengan Negara-negara Eropa daratan yang relatif kecil. Pembeda kedua adalah Identifikasi Sosial masyarakat yang beragam berdasarkan suku dan penerimaannya terhadap hukum negara.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana proses legal making di ruang legislator. Misalnya, apakah pembuatan UU yang berkaitan dengan pertambangan melibatkan masyarakat adat atau aspirasi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Papua dst. Soal akses masyarakat terhadap pembentukan UU itu satu hal saja, hal lain yaitu bagaimana sosialisasi pemerintah terhadap UU yang telah diundangkan. Apakah dengan hanya perintah untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, dll, dapat menjamin masyarakat mengetahui adanya peraturan yang diundangkan tersebut.

B. Daftar Calon Asesi

Dalam Sejarah Hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis, jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi munculah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam satu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibikin oleh badan publik, hal itu memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat.

Lalu bagaimana kira-kira bila dibandingkan dengan konteks Indonesia? Pertama, soal geografis adalah pembeda yang paling tajam antara NKRI dengan Negara-negara Eropa daratan yang relatif kecil. Pembeda kedua adalah Identifikasi Sosial masyarakat yang beragam berdasarkan suku dan penerimaannya terhadap hukum negara.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana proses legal making di ruang legislator. Misalnya, apakah pembuatan UU yang berkaitan dengan pertambangan melibatkan masyarakat adat atau aspirasi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Papua dst. Soal akses masyarakat terhadap pembentukan UU itu satu hal saja, hal lain yaitu bagaimana sosialisasi pemerintah terhadap UU yang telah diundangkan. Apakah dengan hanya perintah untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, dll, dapat menjamin masyarakat mengetahui adanya peraturan yang diundangkan tersebut.

C. Jadwal Rencana Uji Kompetensi

Adapun Jadwal Rencana Uji Kompetensi Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Jadwal Kegiatan PSKK Tester
Tahun 2019**

TGL	SKEMA SERTIFIKASI	TUK	ASESOR KOMPETENSI
31/01/2020 - 31/01/2020	SKEMA TESTER	TUK IKITAS	1 RAINA SUCI RISTYANTI

6. CONTOH GAMBAR PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

BAB IV
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

1. Skema Sertifikasi, .

Jumlah Peserta

1.000 (Satu Ribu) asesi dengan 50 (Lima Puluh) paket

Rincian Biaya Per Paket (20 orang), pelaksanaan Sertifikasi Sektor PSKK Tester :

NO	ITEM KEGIATAN	NILAI PER PAKET	PAJAK	YANG DIBAYARKAN (RP)
1	Ts	10.000.000	650.000	9.350.000

7. CONTOH GAMBAR RAB

BAB V PENUTUP

Dalam Sejarah Hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis, jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi munculah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam satu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibikin oleh bandan publik. hal itu memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat.

Lalu bagaimana kira-kira bila dibandingkan dengan konteks Indonesia? Pertama, soal geografis adalah pembeda yang paling tajam antara NKRI dengan Negara-negara Eropa daratan yang relatif kecil. Pembeda kedua adalah Identifikasi Sosial masyarakat yang beragam berdasarkan suku dan penerimaannya terhadap hukum negara.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana proses legal making di ruang legislator. Misalnya, apakah pembuatan UU yang berkaitan dengan pertambangan melibatkan masyarakat adat atau aspirasi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Papua dst. Soal akses masyarakat terhadap pembentukan UU itu satu hal saja. hal lain yaitu bagaimana sosialisasi pemerintah terhadap UU yang telah diundangkan. Apakah dengan hanya perintah untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, dll, dapat menjamin masyarakat mengetahui adanya peraturan yang diundangkan tersebut.

8. Contoh GAMBAR penutup